

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan perkenannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun 2023-2026. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah ini kami berharap dapat memperoleh masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini.

Pati, Februari 2024



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PATI

**Drs. JUMANI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701114 199011 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati merupakan Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas sebagai fungsi koordinator dari Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait yang mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2023 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Pati dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan adalah sebesar **103,50%**. Berikut capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati pada tahun 2023 per Sasaran Strategis :



Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, maka kedepan akan dilakukan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya dengan melakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua bagian yang dilandasi dengan perencanaan yang terukur dan komitmen pada pelaksanaan tugas dan fungsi. Sedangkan upaya untuk

meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik lagi, perlu melakukan re-orientasi terhadap formulasi indikator kinerja program dan kegiatan supaya bisa terukur dengan tepat.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Grafik</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Gambaran Umum .....	1
1.2 Cascading Kinerja .....	2
1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
1.5 Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sarana Prasarana dan Anggaran .....	6
1.6 Isu Strategis .....	10
1.7 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2022 .....	11
1.8 Sistematika .....	12
<b>BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b> .....	<b>13</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	13
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	19
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b> .....	<b>23</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	23
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 ...	23
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	26
3.1.3 Evaluasi Kinerja Tahun 2023 .....	46
3.2 Akuntabilitas Keuangan .....	48
<b>BAB IV Penutup</b> .....	<b>55</b>
Daftar Lampiran :	
1. Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	
2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023	
3. Laporan Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Triwulan IV Tahun 2023	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Aparatur (PNS) Setda Kabupaten Pati Tahun 2023 ..	6
Tabel 1.2	SDM Aparatur ( Non PNS) Setda Kabupaten Pati Tahun 2023 .....	7
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2023 .....	9
Tabel 2.1	Pemetaan Program dan Kegiatan Sesuai dengan Sasaran Strategis .....	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja dan Target Sesuai Sasaran Strategis Tahun 2023 .....	18
Tabel 2.3	IKU Setda Kabupaten Pati Tahun 2023 .....	19
Tabel 2.4	Pemetaan Program dan Kegiatan Per Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 .....	20
Tabel 3.1	IKU Sekretariat Daerah dan Target Kinerja Tahun 2023 ..	23
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 .....	25
Tabel 3.3	Tabel Capaian Sasaran Strategis I .....	29
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Daerah yang Mendukung Sasaran Strategis I .....	30
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis I .....	32
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis I .....	33
Tabel 3.7	Tabel Capaian Sasaran Strategis II .....	36
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Daerah yang Mendukung Sasaran Strategis II .....	37
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis II .....	38
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis II .....	39
Tabel 3.11	Tabel Capaian Sasaran Strategis III .....	42
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis III .....	43

Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis III .....	44
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Bagian .....	46
Tabel 3.15	Capaian Kinerja yang Belum Mencapai Target .....	47
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	49
Tabel 3.17	Rekapitulasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	53
Tabel 3.18	Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja masing-masing Bagian Tahun Anggaran 2023 .....	54

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Berdasarkan Golongan Tahun 2023 .....	8
Grafik 1.2	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023 .....	9
Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 .....	26
Grafik 3.2	Realisasi Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis I.....	32
Grafik 3.3	Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Strategis I.....	35
Grafik 3.4	Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Sasaran Strategis II .....	41
Grafik 3.5	Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Sasaran Strategis III .....	45
Grafik 3.6	Capaian Kinerja Bagian .....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. GAMBARAN UMUM

Dalam Rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap Instansi Pemerintah / Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
5. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
6. Perbup Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Setda Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

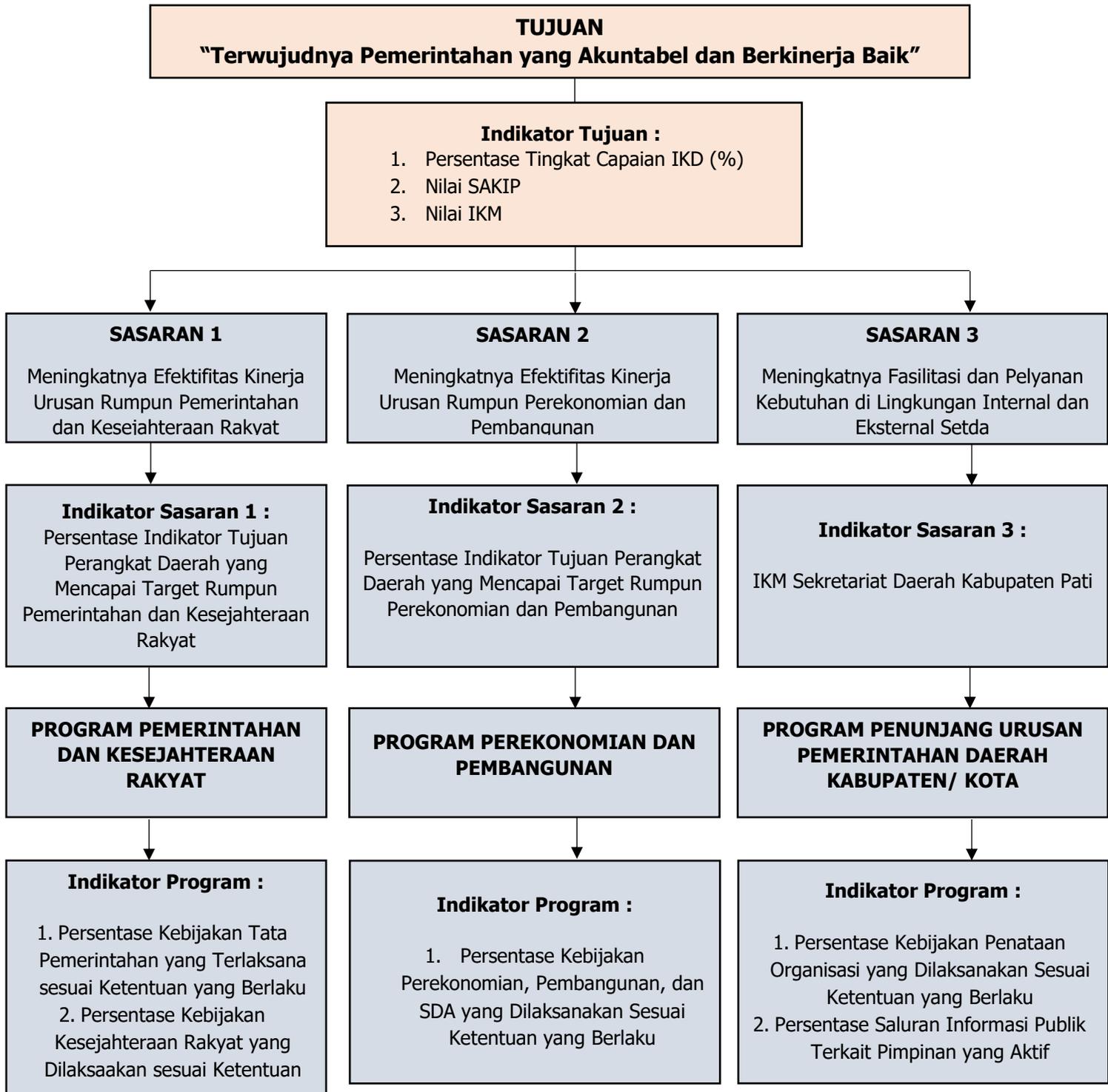
Setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodic sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBD dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

## **1.2. CASCADING KINERJA**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pati setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dibentuk dengan skema kinerja sebagaimana gambar berikut :

**Gambar 1.1  
Cascading Kinerja**

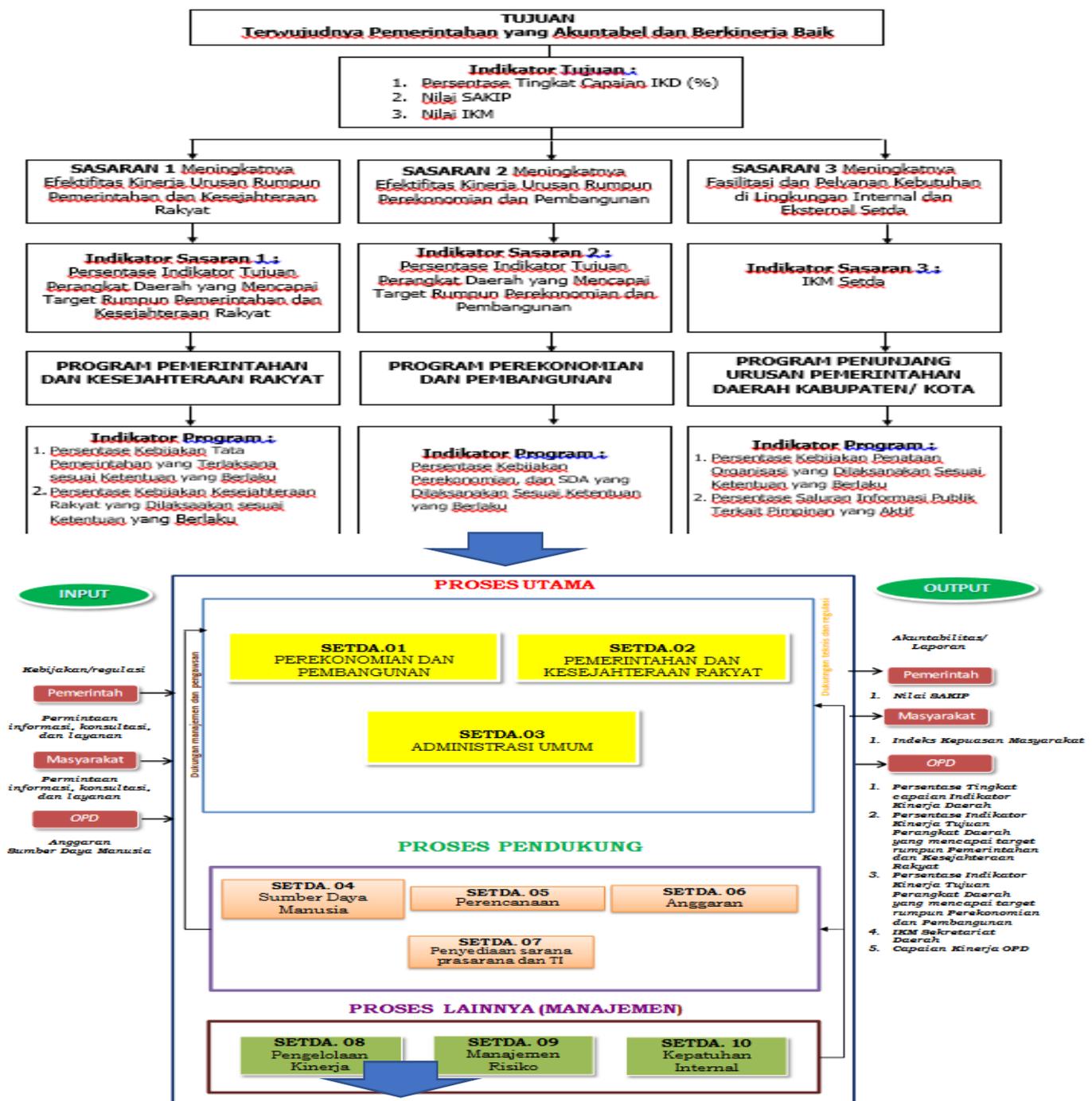


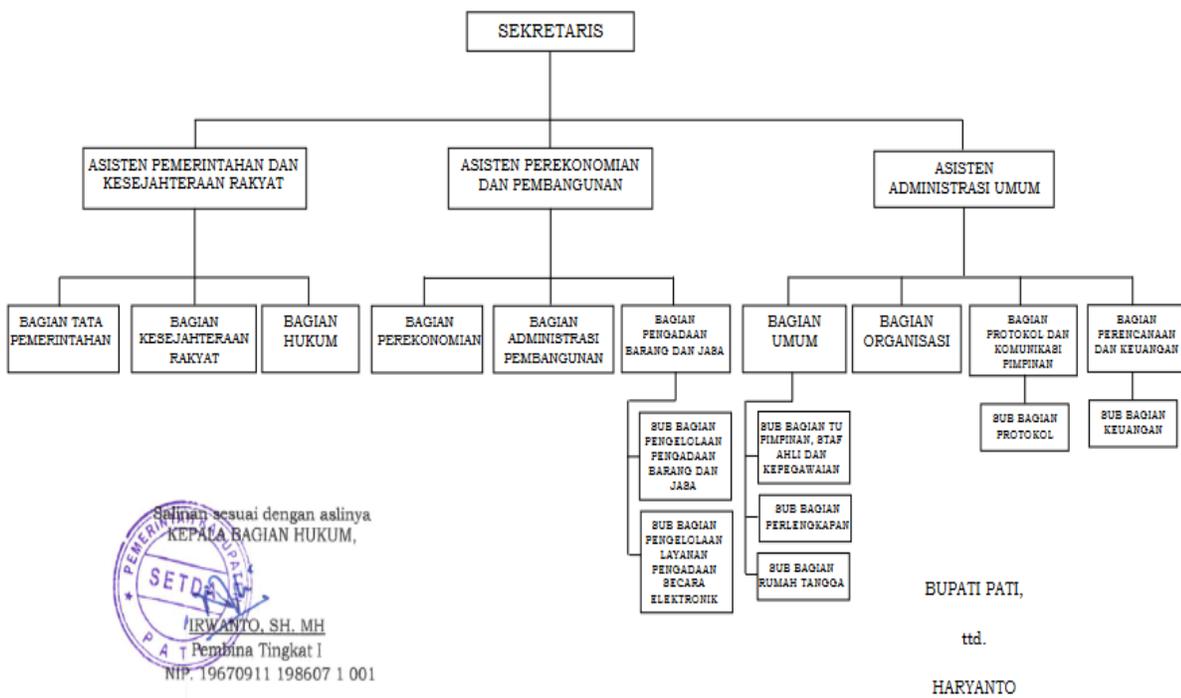
### 1.3. MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI

Perangkat Daerah itu ada / dibentuk karena mempunyai tugas / mandate yang harus dilaksanakan atau ada kinerja yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah sampai ke individu pegawai di Perangkat Daerah harus jelas "siapa melakukan apa" (target kinerja jelas dan terukur) sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya, termasuk proses untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan tersebut. Adapun hubungan Antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Gambar 1.2

Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi





#### 1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu **“Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif”**

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Pati mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Instansi Daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1.5. DUKUNGAN SUMBER DAYA (SDM APARATUR PER JENIS JABATAN TERMASUK TENAGA NON PNS / THL, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati pada Tahun 2023 agar mencapai tujuan dan sasaran organisasi selain manajemen organisasi yang baik sangat diperlukan adanya dukungan baik Sumber Daya Manusia, sarana prasarana maupun anggaran. Adapun dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur, sarana prasarana dan anggaran tahun 2023 di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

#### a. Dukungan SDM Aparatur

**Tabel 1.1**  
**SDM Aparatur (PNS) Setda Kabupaten Pati Tahun 2023**

No.	Unit Organisasi	Jumlah
1.	Sekretaris Daerah	1
2.	Staf Ahli	3
3.	Asisten I	1
4.	Asisten II	0
5.	Asisten III	1
6.	Bagian Tata Pemerintahan	8
7.	Bagian Prokompim	12
8.	Bagian Hukum	10
9.	Bagian Perekonomian	9
10.	Bagian Administrasi Pembangunan	11
11.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7
12.	Bagian Organisasi	10
13.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	11
14.	Bagian Umum	39
15.	Bagian Pengadaan Barang Jasa	15
	Jumlah	138

Sumber : Bagian Umum Setda Kabupaten Pati

**Tabel 1.2**  
**SDM Aparatur (Non PNS/ THL) Setda Kabupaten Pati Tahun 2023**

No.	Unit Organisasi	Jumlah
1.	Bagian Tata Pemerintahan	3
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7
3.	Bagian Hukum	2
4.	Bagian Perekonomian	3
5.	Bagian Administrasi Pembangunan	0
6.	Bagian PBJ	0
7.	Bagian Organisasi	0
8.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	14
9.	Bagian Umum	40
10.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	3
Jumlah		72

*Sumber : Bagian Umum Setda Kabupaten Pati*

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah SDM di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati (PNS dan Tenaga Non PNS / THL) sebanyak 210 Orang yang terbagi kedalam 10 Bagian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Pati didukung dengan susunan kepegawaian dengan jumlah karyawan karyawan PNS sebanyak 138 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

#### **1. Berdasarkan golongan**

Golongan IV sebanyak 20 orang, terdiri dari :

- ❖ IV/a : 7 orang
- ❖ IV/b : 8 orang
- ❖ IV/c : 4 orang
- ❖ IV/d : 1 orang

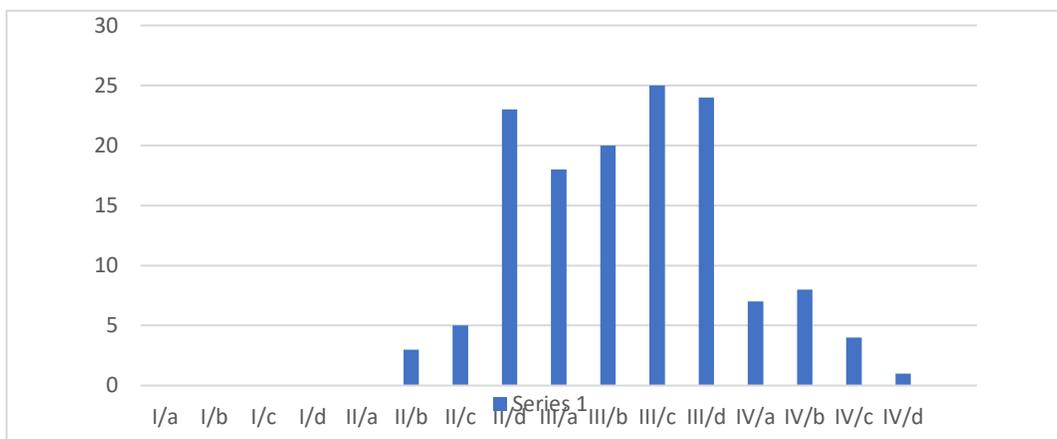
Golongan III sebanyak 87 orang, terdiri dari:

- ❖ III/a : 18 orang
- ❖ III/b : 20 orang
- ❖ III/c : 25 orang
- ❖ III/d : 24 orang

Golongan II sebanyak 31 orang, terdiri dari:

- ❖ II/a : -
- ❖ II/b : 3 orang
- ❖ II/c : 5 orang
- ❖ II/d : 23 orang
- Total : 138 orang**

**Grafik 1.1**  
**Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan SETDA Kabupaten Pati**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2023**



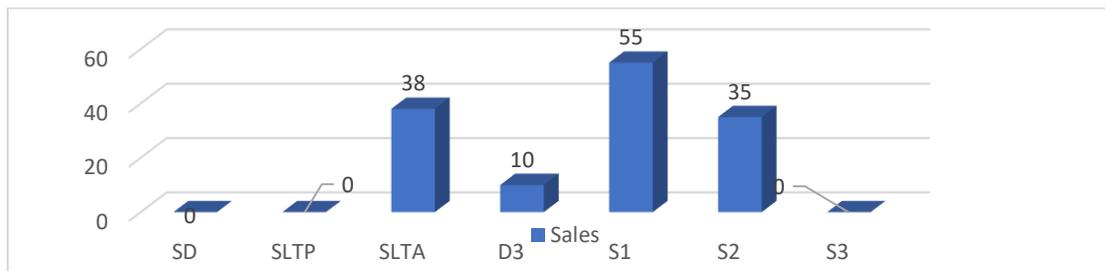
Dari grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah PNS terbanyak di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah PNS yang mempunyai golongan ruang yaitu III/c sebanyak 25 orang.

**2. Berdasarkan pendidikan**

- ❖ SD : -
- ❖ SLTP : -
- ❖ SLTA : 38 orang
- ❖ D3 : 10 orang
- ❖ S1 : 55 orang
- ❖ S2 : 35 orang



**Grafik 1.2**  
**Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Pati Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023**



Dari grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang Pendidikan sebagian besar PNS di Lingkup kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah Strata 1 (S1) dengan persentase atau sebanyak 55 orang.

**b. Dukungan Sarana dan Prasarana**

**Tabel 1.3**

**Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah per 31 Desember 2023**

No	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2023	
		Satuan	Jumlah
1	Tanah	Bidang	3
2	Alat Besar	Unit	31
3	Komputer	Unit	298
4	Alat Keselamatan Kerja	Unit	10
5	Peralatan Olahraga	Unit	2
6	Alat Angkutan	Unit	128
7	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Unit	11
8	Alat Pertanian	Unit	8
9	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	3.996
10	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Unit	276
11	Alat Laboratorium	Unit	61
12	CCTV	Unit	13
14	Bangunan Gedung	Unit	33
15	Bangunan Air	Unit	1
16	Instalasi	Unit	7
17	Jaringan	Unit	11
18	Bahan Perpustakaan	Unit	405
19	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	Unit	1

Sumber : Bagian Umum Setda Kabupaten Pati

## **b. Dukungan Anggaran**

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2023, jumlah anggaran belanja keseluruhan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 39.562.632.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 42.198.689.000,- terdiri atas Belanja Operasional dan Non Operasional. Sedangkan Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang sesuai dengan perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 11.751.102.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 14.236.933.000,- .

## **1.6. ISU STRATEGIS**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah / panjang dan menentukan pencapaian tujuan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, juga menggambarkan lingkungan strategis Sekretariat Daerah yang meliputi dinamika skala regional, nasional maupun Internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun jangka waktu menengah atau jangka panjang. Sekretariat Daerah Kabupaten Pati memiliki Isu Strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik;
2. Meningkatkan bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Hukum dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rumpun masing masing;
3. Meningkatkan peran Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang Jasa dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rumpun masing masing dan;
4. Meningkatkan peran bagian Organisasi dan Prokompim dalam pelayanan kebutuhan di lingkungan Internal dan eksternal Sekretariat Daerah;

## 1.7 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP 2022

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, maka setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Instansi Pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat progress nilai hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pati kurun waktu 2019 – 2022 :

**Tabel 1.4**  
**Pogres Nilai SAKIP Setda Kabupaten Pati**  
**Tahun 2019 – 2022**

No.	Tahun	Nilai	Kategori	Keterangan
1	2019	74,68	BB	Sangat Baik
2	2020	77,63	BB	Sangat Baik
3	2021	78,59	BB	Sangat Baik
4	2022	79,15	BB	Sangat Baik

Sumber: LHE (Laporan Hasil Evaluasi LKjIP) 2019 – 2022

Berdasarkan tabel 1.4 diatas menunjukkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, pencapaian SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati mendapatkan kategori “BB” atau Sangat Baik dimana selalu ada kenaikan nilai pada setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari peran seluruh pemegang program dan kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Selain itu kami akan terus berupaya untuk selalu meningkatkan nilai capaian SAKIP Sekretariat Daerah disetiap tahunnya. Adapun Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2022 terhadap Setda Kabupaten Pati sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 1.5**  
**Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Setda Kabupaten Pati**  
**Tahun 2022**

No.	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Menggunakan Teknologi Informasi / (Aplikasi)	Menggunakan fasilitasi dari Google drive dalam Pengukuran, monitoring, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Sumber : LHE (Laporan Hasil Evaluasi ) LKjIP Tahun 2019 – 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penilaian SAKIP Setda Kabupaten Pati dengan nilai 79,15 dengan kategori BB (Sangat Baik) terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tahun 2022, terdapat beberapa catatan / rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dengan cara menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan Evaluasi Internal.

## **1.8 SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini memuat ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

#### **B. Analisis Capaian Kinerja**

Sub Bab ini menyajikan analisis capaian kinerja Sekretariat Daerah.

#### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Sub Bab ini menyajikan uraian jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2023.

### **BAB IV PENUTUP**

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Lampiran berisikan data pendukung berupa Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 dan Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023.

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2023-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati. Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan, sehingga Renstra Sekretariat Daerah ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Secara teknis penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### 2.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pati telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Tujuan utama Sekretariat Daerah adalah **“Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik”**. Pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan SDM yang kompeten tersebut diatas memiliki indikator kinerja yang tercantum dan mendukung capaian kinerja RPD yaitu upaya peningkatan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD), Nilai SAKIP, dan Nilai IKM.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan tugas dari Sekretariat Daerah untuk 4 (empat) tahun kedepan agar dapat tercapai minimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan dapat mencapai nilai lebih. Untuk dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan maka harus ditetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran berdampak dalam pencapaian dari tujuan.

### **2.1.2 SASARAN**

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program. Dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Bertitik tolak dari tujuan dan beserta indikatornya yang telah ditetapkan maka Sekretariat Daerah Kabupaten menetapkan 3 (tiga) pokok sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan tahun 2023-2026. 3 (tiga) pokok sasaran utama yang ditetapkan dan hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Meningkatnya Efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
2. Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan;
3. Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda.

Tujuan Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2023 - 2026, dirumuskan sebagai berikut **"Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik"**. Selanjutnya Sekretariat Daerah menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama Tahun 2023 – 2026.



					<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</li> <li>4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar keluarga, warga, dan kelompok Masyarakat</li> <li>5. Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</li> </ul>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</li> <li>2. Fasilitasi Bantuan Hukum</li> <li>3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</li> </ul>	Hukum
Sasaran Strategis 2:						
Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Kebijakan Perekonomian, Pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</li> <li>2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</li> <li>2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</li> <li>3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</li> <li>1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</li> <li>2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</li> </ul>	Perekonomian
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</li> </ul>	Administrasi Pembangunan

					<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</li> <li>3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</li> </ul>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</li> <li>3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>	PBJ
<p>Sasaran Strategis 3:</p> <p>Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda</p>	IKM Setda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Kebijakan Penataan Organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Persentase saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</li> <li>2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</li> <li>3. Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi</li> <li>4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</li> <li>5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</li> </ul>	Organisasi
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</li> <li>2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Keprotokolan</li> <li>2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</li> <li>3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan</li> <li>1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>	Prokompim

Sumber : Renstra Setda Kab. Pati Tahun 2023 - 2026

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati setiap Tahun Anggaran menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Setda Kabupaten Pati.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik		1. Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah	(IKD yang memenuhi kriteria penilaian tinggi berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494 dibagi dengan seluruh jumlah Indikator Kinerja Daerah) x 100%
			2. Nilai SAKIP	Angka Nilai SAKIP
			3. Nilai IKM	Angka Nilai IKM Kabupaten Pati
		1. Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	(Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang memenuhi kriteria penilaian tinggi Permendagri 86 Tahun 2017 hal. 494 / Indikator Kinerja Daerah) x 100%
	2. Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	(Indikator kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Perekonomian dan Pembangunan yang memenuhi kriteria penilaian tinggi Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494 / Indikator Tujuan Perangkat Daerah) x 100%	
	3. Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM SETDA	Angka Nilai IKM Setda	

Sumber : Renstra Setda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, serta merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Sekretariat Daerah Kab. Pati akan melaksanakan APBD untuk mewujudkan komitmen yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 (Lampiran 1). Dokumen Perjanjian Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Kabupaten Pati**  
**Tahun 2023**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik	1. Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah	100%
		2. Nilai SAKIP	65.04
		3. Nilai IKM	3.55
1.1	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%
1.2	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%
1.3	Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM SETDA	3.52

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Pati Tahun 2023

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran strategis maka dilakukan pemetaan program dan kegiatan per sasaran strategis Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Pemetaan Program dan Kegiatan Per Sasaran Strategis**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI
Tujuan :  Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik	1. Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah 2. Nilai SAKIP 3. Nilai IKM				
Sasaran 1 :  Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku  2. Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	<p><b>Kegiatan Adminitrasi Tata Pemerintahan</b></p> <p>1. Penataan Administrasi Pemerintahan 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</p> <p><b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b></p> <p>1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 2. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 3. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</p> <p><b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b></p> <p>1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun</p>	<p><b>Rp. 981.000.000,-</b></p> <p>Rp. 921.650.000,-</p> <p>Rp. 15.000.000,-</p> <p>Rp. 44.350.000,-</p> <p><b>Rp. 108.000.000,-</b></p> <p>Rp. 96.000.000,-</p> <p>Rp. 4.000.000,-</p> <p>Rp. 8.000.000,-</p> <p><b>Rp. 7.336.259.000,-</b></p> <p>Rp. 6.692.103.400,-</p> <p>Rp. 479.155.600,-</p> <p>Rp. 150.000.000,-</p> <p>Rp. 10.000.000,-</p>

				<p>5. Kerja Sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p>	Rp. 5.000.000,-
				<p><b>Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b></p> <p>1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Rp. 152.286.000,-</p> <p>2. Fasilitas Bantuan Hukum Rp. 298.790.000,-</p> <p>3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Rp. 176.081.000,-</p>	<p><b>Rp. 627.157.000,-</b></p>
<p>Sasaran 2:</p> <p>Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan</p>	<p>Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan</p>	<p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p>	<p>1. Persentase Kebijakan Perekonomian, Pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p><b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b></p> <p>1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Rp. 32.314.000,-</p> <p>2. Pengendalian Distribusi Perekonomian Rp. 73.739.000,-</p> <p>3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Rp. 73.947.000,-</p>	<p><b>Rp. 180.000.000,-</b></p>
				<p><b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b></p> <p>1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Rp. 100.000.000,-</p> <p>2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Rp. 5.000.000,-</p>	<p><b>Rp. 105.000.000,-</b></p>
				<p><b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b></p> <p>1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Rp. 40.000.000,-</p> <p>2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Rp. 52.000.000,-</p> <p>3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Rp. 58.000.000,-</p> <p>4. Pelaksanaan Pembangunan</p>	<p><b>Rp. 150.000.000,-</b></p>

				<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b> 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3. Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	<b>Rp. 90.000.000,-</b>  Rp. 41.100.000,- Rp. 23.600.000,- Rp. 25.300.000,-
Sasaran 3:  Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM Setda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Kebijakan Penataan Organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Persentase saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b> 1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	<b>Rp. 719.686.000,-</b>  Rp. 299.049.000,- Rp. 99.800.000,- Rp. 290.897.000,- Rp. 4.940.000,- Rp. 25.000.000,-
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b> 1. Fasilitasi Keprotokolan 2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	<b>Rp. 1.259.000.000,-</b>  Rp. 105.000.000,- Rp. 71.600.000,- Rp. 1.082.400.000,-
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>Rp. 195.000.000,-</b>  Rp. 195.000.000,-

Sumber: Dokumen Renja Setda Kabupaten Tahun 2023

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah merupakan satu langkah dalam menilai tingkat pencapaian terhadap target sasaran sebagai nilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2023-2026. Kinerja Sekretariat Daerah menggambarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran serta tingkat pencapaian masing-masing program dan kegiatan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati juga menginformasikan realisasi indikator sasaran melalui pengukuran kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui capaian keberhasilan kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

##### 3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah merupakan indikator sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama Kabupaten Pati yaitu terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja baik. Adapun IKU Sekretariat Daerah dan targetnya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**IKU Sekretariat Daerah dan Target Kinerja Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik		1. Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah 2. Nilai SAKIP 3. Nilai IKM	100% 65.04 3.41
		Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun	100%

		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%
	Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM SETDA	3.52

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 2023-2026

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi / Melampaui Target
2	=100 %	Sesuai Target
3	<100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Pati Tahun 2023**

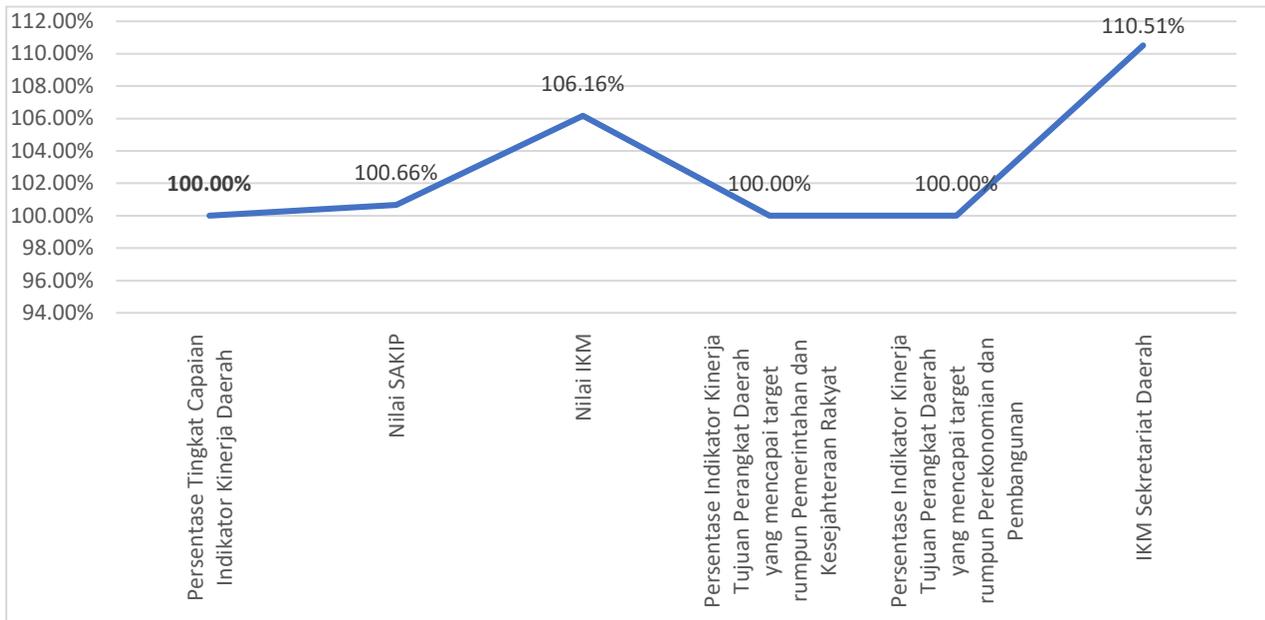
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023	KATEGORI
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik		1. Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah	100%	100%	100%	100%	MENCAPAI TARGET
			2. Nilai SAKIP	65.04	65,47	65,47*	100,66%	MELAMPAUI TARGET
			3. Nilai IKM	3.41	3,55	3,64	106,74%	MELAMPAUI TARGET
		Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	MENCAPAI TARGET
	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	MENCAPAI TARGET	
	Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM SETDA	3.52	3.52	3.89	110,51%	MELAMPAUI TARGET	

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati, Tahun 2023

\* : Capaian LKjIP Tahun 2022, Capaian Tahun 2023 masih dalam proses olah data.

Rata-rata Capaian IKU Setda pada Tahun 2023 sebesar 102,83 % atau melebihi target. Gambaran Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 dapat dilihat pada diagram berikut:

**Grafik 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Pati Tahun 2023**



Sumber : Bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati

### 3.1.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran Strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap Sasaran Strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan :

1. Melakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu,
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi,
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,
5. Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

## **ANALISIS CAPAIAN TUJUAN**

Keberhasilan tujuan diukur dengan tiga indikator yaitu Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah, Nilai SAKIP dan Nilai IKM. Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2023 ada tiga indikator tersebut mencapai target bahkan ada yang melampaui Target. Pada tabel 3.2 Ada dua indikator tujuan yang melampaui target diantaranya :

### **1. Nilai SAKIP**

Terkait Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan nilai, Sekalipun capain nilai SAKIP Tahun 2023 masih dalam proses olah data tetapi kami optimis bahwa nilai SAKIP Tahun 2023 meningkat. Sebagai tindak lanjut atas Laporan hasil Evaluasi Kabupaten Pati, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan beberapa Rekomendasi untuk dilaksanakan sebagai Upaya perbaikan penyelenggaraan SAKIP di Kabupaten Pati. Adapun Upaya Tindak lanjut Guna meningkatkan capaian SAKIP di Kabupaten Pati ke depan diantaranya sebagai berikut:

- Melaksanakan Desk dengan Perangkat Daerah bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Pati terkait :
  - a. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Penyempurnaan Pohon Kinerja Pemda sesuai PermenPAN 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
  - c. Melengkapi cascading Perangkat Daerah dengan Definisi Operasional
  - d. Penambahan bukti dukung evaluasi pelaksanaan operasional dan hasil rapat koordinasi pelaksanaan operasional kegiatan pada [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) dalam hal ini dok renja dan laporan Rakorpok.
  - e. Meningkatkan kualitas pengisian evaluasi renja dengan melengkapi penjelasan factor pendorong dan penghambat.
  - f. Mendorong Perangkat Daerah untuk menggunakan hasil analisa faktor penghambat dalam perencanaan kinerja kedepan

- Bekerjasama dengan Inspektorat Daerah dan BPKAD melaksanakan Desk dan reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2024
- Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian reward and punishment kepada Perangkat Daerah sehingga evaluasi AKIP Internal dapat mendorong perbaikan Implementasi SAKIP yang ditindaklanjuti dengan Raperbup TPP dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah.

## 2. Nilai IKM

Nilai SKM Kabupaten Pati Tahun 2022 dan 2023 mengalami tren kenaikan nilai dengan nilai SKM yang diperoleh sebesar 91 dengan nilai indeks sebesar 3,64 untuk pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dapat disimpulkan bahwa rata – rata pengguna layanan yang datang ke tempat pelayanan di instansi penyelenggaraan layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa mutu pelayanan Pemerintah Kabupaten Pati pada Tahun 2023 berkategori Sangat Baik.

Sebagai Upaya Tindak Lanjut untuk mempertahankan Pelayanan dengan mutu Layanan Sangat Baik guna memenuhi fasilitas dalam hal sarana prasarana layanan publik yang memadai dan nyaman, diantaranya dengan memberikan kemudahan akses, ketersediaan parkir, fasilitas bagi anak dan ibu menyusui, fasilitas bagi penyandang disabilitas bahkan hingga ke ruang tunggu yang nyaman agar dikonsepsi dengan cukup Baik.

Selain sarana prasarana biaya atau tarif adalah salah satu unsur yang perlu diperhatikan. Organisasi Sektor Publik senantiasa dituntut untuk bekerja secara akuntabel dengan mengedepankan kejujuran dan profesionalisme dalam segala hal baik SDM, pengelolaan, maupun yang terpenting manajemen keuangan. Komponen standar pelayanan public ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas luasnya kepada public sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan- tindakan mal administrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur penundaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan penyimpangan. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan dalam penyelenggaraannya.

## ANALISIS KETERCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Analisis terhadap Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada masa akhir Renstra, disajikan sebagai berikut :

### Sasaran Strategis I “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, ditetapkanlah sasaran Meningkatkan Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Kinerja Persentase Indikator Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Berikut adalah hasil pengukuran penetapan kinerja Sekretariat Daerah yang telah dicapai tahun 2023 dan dilakukan analisis capaian atas indikator kinerja sasaran Strategis 1 “**Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**” sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Tabel Capaian Sasaran strategis 1 Meningkatkan Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
1	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Berdasarkan tabel 3.3 diatas capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat” adalah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 sebesar 100% tersebut diperoleh dari perhitungan sebagaimana berikut :

## FORMULA :

(Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang memenuhi kriteria penilaian tinggi sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494)

$$\frac{\text{Indikator Kinerja Daerah yang masuk dalam Rumpun Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat}}{\text{Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat}} \times 100\%$$

Tabel Skala Penilaian Perangkat Kinerja sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494 sebagai berikut :

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Capaian Indikator Kinerja Daerah yang mendukung Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat" sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Daerah yang mendukung Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat"**

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kriteria
1	Angka Kemiskinan	9,33%	9,82%	9,31%	105,48%	Sangat Tinggi
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,14	73,08	73,59	100,70%	Sangat Tinggi
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<b>92,42</b>	92,26	<b>92,42*</b>	100,17%	Sangat Tinggi

Sumber: Data Badan Pusat Statistik tahun 2023

\* : Capaian Tahun 2022, capaian data tahun 2023 masih dalam proses olah data

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat disimpulkan analisa sebagai berikut dimana Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 yang mendukung Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat” telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% oleh karena ketiga (3) Indikator Kinerja Daerah (Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Gender) tersebut telah memenuhi kriteria penilaian Sangat Tinggi dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang memenuhi kriteria penilaian tinggi Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494 = **sebanyak 3 Indikator Kinerja terdiri dari (2 indikator kinerja 2023 dan 1 indikator kinerja tahun 2022 yang kami optimis perolehannya di tahun 2023 pun melebihi target)**
2. Jumlah Indikator Kinerja Daerah pada rumpun Pemerintahan dan Kesra : **sebanyak 3 Indikator Kinerja**

**Jadi perhitungannya :  $(3/3) \times 100\% = 100\%$**

Adapun strategi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis 1 **“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”** Ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Ada 4 (empat) kegiatan yang berasal dari 1 (satu) program kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis 1 **“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”** diantaranya adalah :

### **Program**

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

### **Kegiatan**

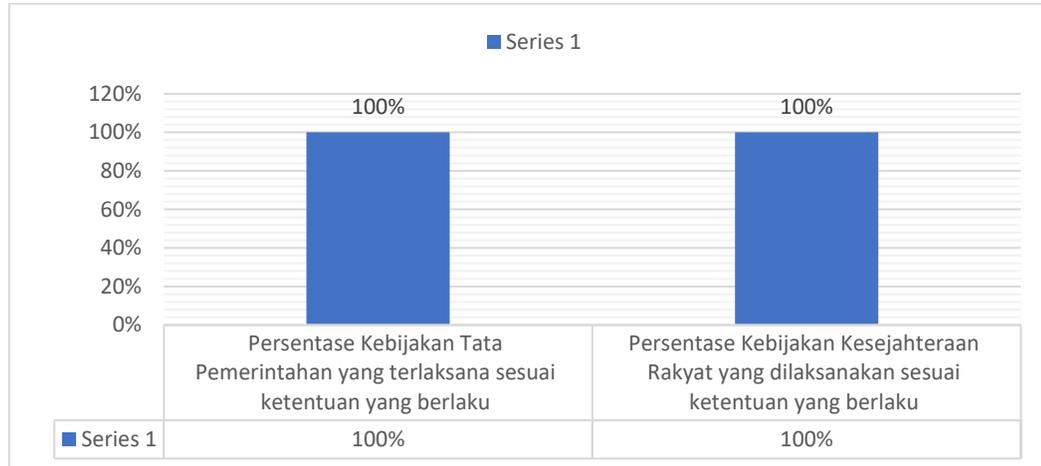
1. Administrasi Tata Pemerintahan;
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah.

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 1**  
**“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”**

No	Indikator Program	Formula	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
1	Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana dibanding Kebijakan Tata Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
2	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana dibanding Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

**Grafik 3.2**  
**Realisasi Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 1**  
**“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”**



**Tabel 3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1**  
**“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”**

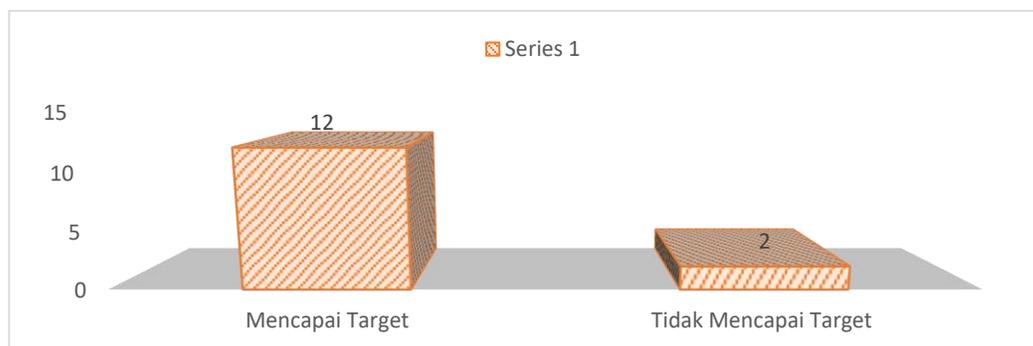
Indikator Kinerja Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2023			Koordinator
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
1. PERSENTASE KEBIJAKAN TATA PEMERINTAHAN YANG TERLAKSANA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU	KEGIATAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	1. Persentase peraturan bidang tata pemerintahan pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan
		2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang tata pemerintahan	%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan
	1. Penataan Administrasi Pemerintah	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	Dokumen	31	31	100 %	Bagian Tata Pemerintahan
	2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	Dokumen	1	1	100 %	Bagian Tata Pemerintahan
	3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen	8	8	100 %	Bagian Tata Pemerintahan
2. PERSENTASE KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU	KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase peraturan bidang kesra pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	%	100%	100%	100%	Bagian Kesra
		2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang kesra	%	100%	100%	100%	Bagian Kesra
	1. Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Dokumen	34	34	100 %	Bagian Kesra
	2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi	Dokumen	12	12	100 %	Bagian Kesra

	Kesejahteraan Sosial	kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB					
	3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kerajinan, trantibum linmas	Dokumen	8	8	100 %	Bagian Kesra
	4. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Keluarga	90	90	100 %	Bagian Kesra
	5. Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Keluarga	50	50	100 %	Bagian Kesra
	KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase verifikasi rancangan/konsep produk hukum daerah	%	100%	63,53 %	63,53 %	Bagian Hukum
		Persentase kasus yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	957	608	63,53 %	Bagian Hukum
	2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Kasus	3	3	100%	Bagian Hukum
	3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Dokumen	957	608	63,53 %	Bagian Hukum
	KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan
	1. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	Dokumen	20	20	100%	Bagian Tata Pemerintahan
	2. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Dokumen	1	1	100%	Bagian Tata Pemerintahan

	3. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	Laporan	2	2	100%	Bagian Tata Pemerintahan

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

**Grafik 3.3**  
**Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”**



Berdasarkan Grafik 3.4 di atas Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat disimpulkan bahwa dari 14 (empat belas) indikator sub kegiatan dan 4 (empat) indikator kegiatan, ada 12 (dua belas) indikator sub kegiatan yang mencapai target, dan 2 (dua) indikator sub kegiatan tidak mencapai target yaitu **Jumlah produk hukum daerah yang disusun** dan **Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi** oleh karena kebijakan Pemerintah Pusat melakukan deregulasi kebijakan agar Pemerintah Daerah tidak banyak membuat regulasi. Selain itu kedudukan Pj Bupati berdampak pada tahapan proses penyusunan regulasi yang mengharuskan adanya persetujuan Mendagri sebelum menandatangani produk hukum.

**Sasaran Strategis II**  
**“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun**  
**Perekonomian dan Pembangunan”**

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, ditetapkanlah Sasaran Strategis II Meningkatkan Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan. Berikut adalah hasil pengukuran penetapan kinerja Sekretariat Daerah yang telah dicapai tahun 2023 dan dilakukan analisis capaian atas indikator kinerja Sasaran Strategis II sebagai berikut :

**Tabel 3.7**

**Tabel Capaian Sasaran strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan ”**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
1	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target

*Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati*

Berdasarkan tabel 3.6 diatas capaian Sasaran Strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan” adalah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Realisasi Kinerja Sasaran Strategis II sebesar 100% tersebut diperoleh dari perhitungan sebagaimana berikut :

(Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Perekonomian dan Pembangunan yang memenuhi kriteria penilaian tinggi Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494 / Indikator Kinerja Daerah ) x 100%

Capaian Indikator Kinerja Daerah yang mendukung Sasaran Strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan” sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Tabel Capaian Indikator Kinerja Daerah yang mendukung Sasaran Strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan”**

No	Indikator Kinerja Daerah	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kriteria
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,25%	5,56%	130,82%	Sangat Tinggi
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,84%	4,29%	111,72%	Sangat Tinggi

*Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati*

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat kita simpulkan Capaian Indikator Kinerja Daerah yang mendukung Sasaran Strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan” telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% oleh karena kedua Indikator Kinerja tersebut telah memenuhi kriteria penilaian Sangat Tinggi dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang memenuhi kriteria penilaian tinggi Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494 = **sebanyak 2 Indikator Kinerja**

2. Jumlah Indikator Kinerja Daerah : **sebanyak 2 Indikator Kinerja**

**Jadi perhitungannya :  $(2/2) \times 100\% = 100\%$**

Strategi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan” ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis II Meningkatkan Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan antara lain :

## **Program**

Program Perekonomian dan Pembangunan

## Kegiatan

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

Untuk mengukur realisasi program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target Sasaran Strategis II Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis II "Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan "**

No	Indikator Program	Formula	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
1	Presentase Kebijakan Perekonomian, Pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Kebijakan Perekonomian, Pembangunan, dan SDA yang terlaksana dibanding Kebijakan Perekonomian, Pembangunan, dan SDA	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target

*Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati*

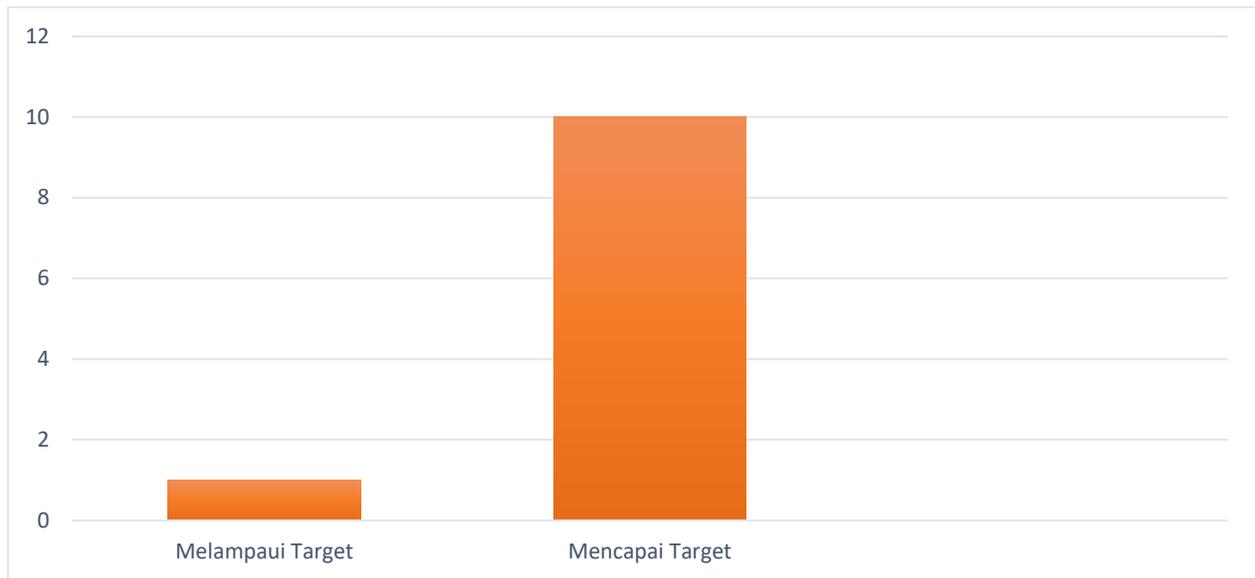
**Tabel 3.10**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis II "Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan"**

Indikator Kinerja Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2023			Koordinator
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>PRESENTASE KEBIJAKAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN, DAN SDA YANG DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU</b>	<b>PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN</b>	1. <b>Persentase peraturan bidang perekonomian pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE) Bupati, SE)</b>	%	10 0 %	10 0 %	100%	<b>Bagian Perekonomian</b>
		2. <b>Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang perekonomian</b>	%	10 0 %	10 0 %	100%	<b>Bagian Perekonomian</b>
	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	44	44	100%	Bagian Perekonomian
	2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan pengendalian dan distribusi perekonomian	Dokumen	92	92	100%	Bagian Perekonomian
	3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Dokumen	65	65	100%	Bagian Perekonomian
	<b>PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%</b>	%	95 %	44, 89 %	47,25 %	<b>Bagian Adm. Pembangunan</b>
	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen analisis dan pengkajian pembangunan daerah	Dokumen	1	1	100%	Bagian Adm. Pembangunan

	2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Laporan	6	6	100%	Bagian Adm. Pembangunan
	3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Laporan	34	34	100%	Bagian Adm. Pembangunan
	<b>PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>Persentase penyelesaian pemilihan penyedia (tender) oleh UKPBJ</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian PBJ</b>
	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	13	13	100%	Bagian PBJ
	2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	Dokumen	29	29	100%	Bagian PBJ
	3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Orang	100	140	140%	Bagian PBJ
	<b>PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang sumber daya alam</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Perekonomian</b>
	1. koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	Dokumen	8	8	100%	Bagian Perekonomian
	2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	Dokumen	18	18	100%	Bagian Perekonomian

Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati

**Grafik 3.4**  
**Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Sasaran Strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan”**



Berdasarkan Grafik 3.6 dapat disimpulkan bahwa dari 11 (sebelas) Indikator Sub Kegiatan pada Sasaran Strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan” ada 10 (sepuluh) Indikator Sub Kegiatan yang mencapai target dan ada 1 (satu) Indikator Sub Kegiatan yang melampaui target.

## “Meningkatnya Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda”

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, ditetapkanlah Sasaran Strategis III : Meningkatkan Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda dengan indikator IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Berikut adalah hasil pengukuran penetapan kinerja Seketariat Daerah yang telah dicapai tahun 2023 dan dilakukan analisis capaian atas indikator kinerja Sasaran Strategis III sebagai berikut :

**Tabel 3.11**

**Tabel Capaian Sasaran strategis III “Meningkatnya Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda”**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
1	Meningkatnya Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda	IKM Sekretariat Daerah	3,52	3,52	3,89	110,51%	Melampaui Target

*Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati*

Berdasarkan tabel 3.6 diatas capaian Sasaran Strategis III “Meningkatnya Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda” adalah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 110,51%. Hal tersebut membuktikan bahwa rata – rata pengguna layanan yang datang ke tempat pelayanan di Lingkungan Setda Kabupaten Pati merasa sangat Puas terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa mutu pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati pada Tahun 2023 berkategori sangat baik.

Rencana Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah terus membenahi sarana dan prasarana dan peningkatan kebersihan yang mengarah pada upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna layanan. Selain itu rencana tindak lanjut pada unsur Penanganan Pengaduan nantinya perlu diperhatikan terkait tanggung jawab untuk merespon setiap aduan / laporan yang masuk dan ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing. Penyediaan kotak saran / aduan perlu perlu

dibenahi dan kesigapan petugas dalam menerima Laporan yang masuk untuk dicatat dan diteruskan kepada pihak yang dituju sesuai dengan tugas dan fungsi yang menangani pengaduan.

Strategi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis III ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis 3 antara lain :

## Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

## Kegiatan

1. Kegiatan Penataan Organisasi
2. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pengukuran realisasi program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target Sasaran Strategis III Meningkatnya Fasilitas dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis III "Meningkatnya Fasilitas dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda"**

No	Indikator Program	Formula	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
1	Persentase Kebijakan Penataan Organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Kebijakan Penataan Organisasi yang terlaksana dibanding Kebijakan Penataan Organisasi	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
2	Persentase Saluran Informasi Publik terkait Pimpinan yang aktif	Saluran Informasi Publik terkait Pimpinan yang aktif dibanding Saluran Informasi Publik terkait Pimpinan	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target

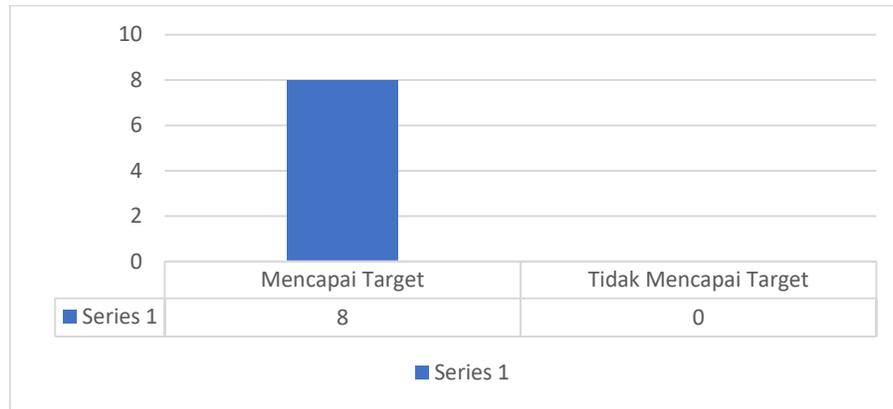
Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati

**Tabel 3.13**  
**Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Sasaran Strategis III**  
**"Meningkatnya Fasilitas dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan**  
**Internal dan Eksternal Setda**

Indikator Kinerja Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2023			Koordinator
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1. PRESENTASE KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI YANG DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU</b>	<b>PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>1. Persentase peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah</b>	%	100 %	100 %	100%	Bagian Organisasi
		<b>2. Persentase penyediaan analisis bidang organisasi</b>	%	100 %	100 %	100%	Bagian Organisasi
<b>2. PERSENTASE SALURAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT PIMPINAN YANG AKTIF</b>	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Dokumen	12	12	100%	Bagian Organisasi
	2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitas pelayanan publik dan tata laksana	Laporan	5	5	100%	Bagian Organisasi
	3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Dokumen	4	4	100%	Bagian Organisasi
	4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Dokumen	1	1	100%	Bagian Organisasi
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Dokumen	1	1	100%	Bagian Organisasi
	<b>PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>	<b>Jumlah saluran informasi publik terkait pimpinan yang dilaksanakan</b>	<b>Media</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Prokompim</b>
	1. Fasilitas Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitas keprotokolan	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim
	2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitas komunikasi pimpinan	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim
	3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim

Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati

**Grafik 3.5**  
**Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Sasaran Strategis III**  
**“Meningkatnya Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda”**



Berdasarkan grafik 3.8 diatas capaian indikator kinerja pada sasaran strategis III Meningkatkan Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda terlihat bahwa seluruh indikator sub kegiatan dengan total 8 (delapan) indikator sub kegiatan.

### 3.1.3 EVALUASI KINERJA

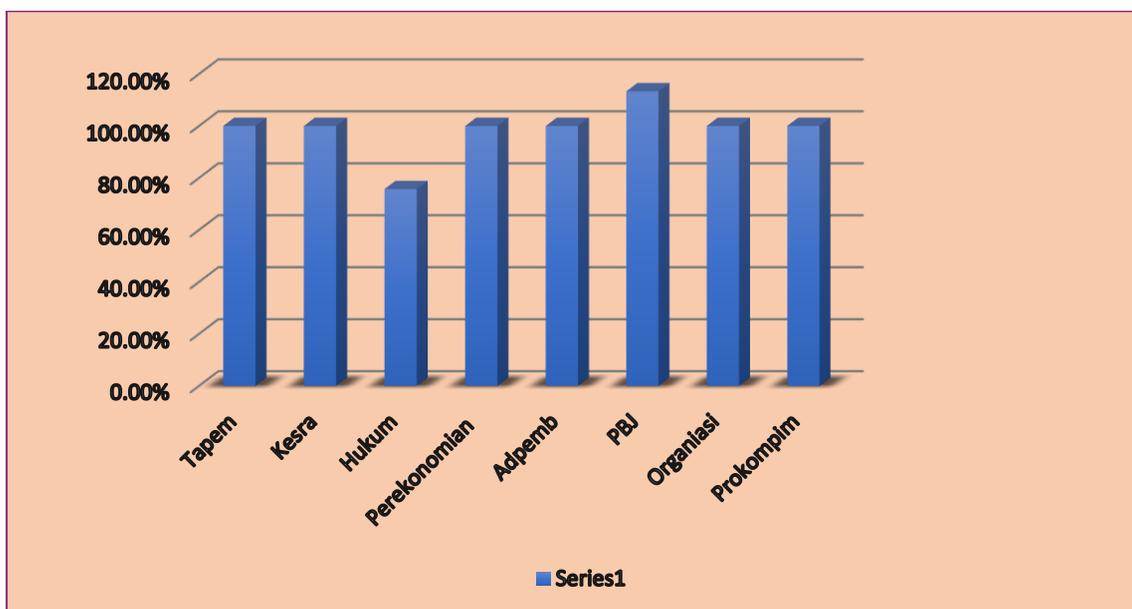
Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari data yang kami peroleh, berikut tingkat capaian kinerja per bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
**Capaian Kinerja Bagian**

No	Bagian	Capaian Kinerja %	Tingkat Keberhasilan
1	Bagian Tata Pemerintahan	100%	BAIK
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100%	BAIK
3	Bagian Hukum	75,69%	CUKUP
4	Bagian Perekonomian	100%	BAIK
5	Bagian Administrasi Pembangunan	100%	BAIK
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	113,33%	SANGAT BAIK
7	Bagian Organisasi	100%	BAIK
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	BAIK

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

**Grafik 3.6**  
**Capaian Kinerja Bagian**



Dari Grafik 3.9 dapat kita analisa bahwa sebagian besar indikator kinerja yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sudah mencapai target, akan tetapi masih ada beberapa indikator kinerja yang ada pada Bagian Hukum yang

capaian kinerjanya belum mencapai target oleh karena indikator tersebut bersifat fasilitasi atau sediaan, sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Capaian Kinerja Yang Belum Mencapai Target**

No	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2023			Penyebab	Solusi ke Depan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Dokumen	957	608	63,53%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Pemerintah Pusat melakukan deregulasi kebijakan agar Pemerintah Daerah tidak banyak membuat regulasi.</li> <li>Selain itu kedudukan PJ Bupati berdampak pada tahapan proses penyusunan regulasi yang mengharuskan adanya persetujuan Mendagri sebelum menandatangani produk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terhadap permohonan persetujuan yang telah diajukan;</li> <li>Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait tentang substansi yang belum disepakati dengan DPRD;</li> </ol>
2	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	957	608	63,53%		

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi. Merujuk pada kegiatan yang masih belum mencapai target, secara garis besar yang disebabkan oleh karena bersifat sediaan sehingga hal ini secara tidak langsung berpengaruh dalam pencapaian realisasi kinerja. Selain itu evaluasi atas perencanaan kinerja yang disusun dan ditetapkan agar target yang diharapkan dapat dicapai bahkan lebih. Langkah ke depan, dalam perencanaan perlu menetapkan target yang tepat dan selaras (sesuai dengan PK (Perjanjian Kinerja) dan Renstra Setda Kab. Pati tahun 2023-2026). Selain itu dalam menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, menetapkan indikator yang terukur dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **3.2 Akuntabilitas Keuangan**

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan setelah adanya perubahan anggaran dapat digambarkan pada tabel 3.15 sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	REALISASI	%	BAGIAN
<b>SASARAN I</b> <b>Meningkatnya</b> <b>Efektifitas</b> <b>Kinerja Urusan</b> <b>Rumpun</b> <b>Pemerintahan</b> <b>dan</b> <b>Kesejahteraan</b> <b>Rakyat</b>	1. Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku 2. Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	<b>1. Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Rp. 981.000.000,-</b>	<b>Rp. 1.164.002.000,-</b>	<b>Rp. 183.002.000,-</b>	<b>Rp. 1.129.178.892,-</b>	<b>97,01 %</b>	<b>Bagian Tapem</b>
		1. Penataan Administrasi Pemerintah	Rp. 921.650.000,-	Rp. 988.362.000,-	Rp. 66.712.000,-	Rp. 966.858.880,-	97,82%	Bagian Tapem
		2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 15.000.000,-	Rp. 75.640.000,-	Rp. 60.640.000,-	Rp. 72.102.350,-	95,32%	Bagian Tapem
		3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 44.350.000,-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 55.650.000,-	Rp. 90.217.662	90,22%	Bagian Tapem
		<b>2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Rp. 7.336.259.000,-</b>	<b>Rp. 9.071.259.000,-</b>	<b>Rp. 1.735.000.000,-</b>	<b>Rp. 8.621.674.532,-</b>	<b>95,04%</b>	<b>Bagian Kesra</b>
		1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 6.692.103.400,-	Rp. 8.422.103.400,-	Rp. 1.730.000.000,-	Rp. 8.007.732.883,-	95,08%	Bagian Kesra
		2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 479.155.600,-	Rp. 484.155.600,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 463.661.649,-	95,77%	Bagian Kesra
		3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-	-	Rp. 136.280.000,-	90,19%	Bagian Kesra
		4. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	-	Rp. 10.000.000,-	100%	Bagian Kesra

		5. Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-	Rp. 5.000.000,-	100%	Bagian Kesra
		<b>3. Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Rp. 627.157.000,-</b>	<b>Rp. 647.157.00,-</b>	<b>Rp. 20.000.000,-</b>	<b>Rp. 509.036.950,-</b>	<b>78,66%</b>	<b>Bagian Tapem</b>
		1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 152.286.000,-	Rp. 152.286.000,-	-	Rp. 147.833.400,-	97,08%	Bagian Tapem
		2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 298.790.000,-	Rp. 318.719.000,-	Rp. 19.929.000,-	Rp. 196.856.400,-	61,75%	Bagian Tapem
		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 176.081.000,-	Rp. 176.081.000,-	-	Rp. 164.347.150,-	93,34%	Bagian Tapem
		<b>4. Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Rp. 108.000.000,-</b>	<b>Rp. 108.000.000,-</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 107.037.750,-</b>	<b>99,11%</b>	<b>Bagian Tapem</b>
		1. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	R. 96.000.000,-	Rp. 96.000.000,-	-	Rp. 95.136.750,-	99,10%	Bagian Tapem
		2. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	-	Rp. 3.932.000,-	98,30%	Bagian Tapem
		3. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	-	Rp. 7.969.000,-	99,61%	Bagian Tapem
<b>JUMLAH SASARAN 1</b>			<b>Rp. 9.052.416.000,-</b>	<b>Rp. 10.990.418.000,-</b>	<b>Rp. 1.938.002.000,-</b>	<b>Rp. 10.366.928.124,-</b>	<b>94,33%</b>	
<b>SASARAN II</b> <b>Meningkatnya</b> <b>Efektifitas</b> <b>Kinerja Urusan</b> <b>Rumpun</b> <b>Perekonomian</b> <b>dan</b> <b>Pembangunan</b>	1. Persentase kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	1. <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Rp. 180.000.000,-</b>	<b>Rp. 180.000.000,-</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 171.421.371,-</b>	<b>95,23%</b>	<b>Bagian Perekonomian</b>
		1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 32.314.000,-	Rp. 32.314.000,-	-	Rp. 32.136.500,-	99,45%	Bagian Perekonomian
		2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 73.739.000,-	Rp. 68.455.000,-	(Rp. 5.284.000,-)	Rp. 67.451.500,-	98,53%	Bagian Perekonomian

		3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 73.947.000,-	Rp. 79.291.000,-	Rp. 5.284.000,-	Rp. 71.833.371,-	90,66%	Bagian Perekonomian
		<b>2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Rp. 150.000.000,-</b>	<b>Rp. 150.000.000,-</b>	-	<b>Rp. 137.149.800,-</b>	<b>91,43%</b>	<b>Bagian Adpemb</b>
		1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	-	Rp. 32.125.000,-	87,81%	Bagian Adpemb
		2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp. 52.000.000,-	Rp. 52.000.000,-	-	Rp. 46.654.850,-	89,72%	Bagian Adpemb
		3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 58.000.000,-	Rp. 58.000.000,-	-	Rp. 55.369.950,-	95,47%	Bagian Adpemb
		<b>3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Rp. 90.000.000,-</b>	<b>Rp. 90.000.000,-</b>	-	<b>Rp. 86.104.096</b>	<b>95,67%</b>	<b>Bagian PBJ</b>
		1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 41.100.000,-	Rp. 41.100.000,-	-	Rp. 39.545.296,-	96,22%	Bagian PBJ
		2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 23.600.000,-	Rp. 23.600.000,-	-	Rp. 23.100.200,-	97,88%	Bagian PBJ
		3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 25.300.000,-	Rp. 25.300.000,-	-	Rp. 23.458.600,-	95,67%	Bagian PBJ
		<b>4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Rp. 105.000.000,-</b>	<b>Rp. 165.087.000,-</b>	<b>Rp.60.087.000,-</b>	<b>Rp. 143.070.444,-</b>	<b>86,66%</b>	<b>Bagian Perekonomian</b>
		1. koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 160.087.000,-	Rp.60.087.000,-	Rp. 138.810.444,-	86,71%	Bagian Perekonomian
		2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan Energi dan Air	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-	Rp. 4.260.000,-	85,20%	Bagian Perekonomian
<b>JUMLAH SASARAN 2</b>			<b>Rp. 525.000.000,-</b>	<b>Rp. 585.087.000,-</b>	<b>Rp. 60.087.000,-</b>	<b>Rp. 537.745.711,-</b>	<b>91,91%</b>	
<b>SASARAN STRATEGIS 3</b>	1. Persentase kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Persentase saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif	<b>1. Penataan Organisasi</b>	<b>Rp. 719.686.000,-</b>	<b>Rp. 838.808.000,-</b>	<b>Rp. 119.122.000,-</b>	<b>Rp. 809.017.014,-</b>	<b>96,45%</b>	<b>Bagian Organisasi</b>
		1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 299.049.000,-	Rp. 299.049.000	-	Rp. 289.607.284,-	96,84%	Bagian Organisasi
		2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 99.800.000,-	Rp. 99.800.000,-	-	Rp.95.759.630,-	95,95%	Bagian Organisasi

		3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 290.897.000,-	Rp. 420.897.000,-	Rp. 130.000.000,-	Rp. 404.846.800,-	96,19%	Bagian Organisasi
		4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 4.940.000,-	Rp. 4.940.000,-	-	Rp. 4.896.000,-	99,11%	Bagian Organisasi
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 25.000.000,-	Rp. 14.122.000,-	(Rp. 10.878.000,-)	Rp. 13.907.300,-	98,48%	Bagian Organisasi
		<b>2. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Rp. 1.259.000.000,-</b>	<b>Rp. 1.567.620.000,-</b>	<b>Rp. 308.620.000,-</b>	<b>Rp. 1.530.859.210,-</b>	<b>97,65%</b>	<b>Bagian Prokompim</b>
		1. Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 105.000.000,-	Rp. 124.000.000,-	Rp. 19.000.000,-	Rp. 122.496.500,-	98,79%	Bagian Prokompim
		2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 71.600.000,-	Rp. 71.600.000,-	-	Rp. 68.664.600	95,90%	Bagian Prokompim
		3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 1.082.400.000	Rp. 1.372.020.000,-	Rp. 289.620.000,-	Rp. 1.339.698.110,-,-	97,64%	Bagian Prokompim
<b>JUMLAH SASARAN 3</b>			<b>Rp.1.978.686.000,-</b>	<b>Rp. 2.406.428.000,-</b>	<b>Rp. 427.742.000,-</b>	<b>Rp. 2.339.876.224</b>	<b>97,23%</b>	
<b>JUMLAH SASARAN 1,2, 3</b>			<b>Rp. 11.556.102.000,-</b>	<b>Rp. 13.981.933.000,-</b>	<b>Rp. 2.425.831.000,-</b>	<b>Rp. 13.244.550.059,-</b>	<b>94,73%</b>	

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

**Tabel 3.17**  
**Rekapitulasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (Rp)	REALISAS	%
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik		1. Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah 2. Nilai SAKIP 3. Nilai IKM	100%	100%	100%					
		Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	Rp. 9.052.416.000,-	Rp. 10.990.418.000,-	Rp. 1.938.002.000,-	Rp. 10.366.928.124,-	94,33%
		Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	Rp. 525.000.000,-	Rp. 585.087.000,-	Rp. 60.087.000,-	Rp. 537.745.711,-	91,91%
		Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM SETDA	3.52	3.89	110,51%	Rp. 1.978.686.000,-	Rp. 2.406.428.000,-	Rp. 427.742.000,-	Rp. 2.339.876.224,-	97,23%
<b>JUMLAH, Sasaran 1,2,3</b>							<b>Rp. 11.556.102.000,-</b>	<b>Rp. 13.981.933.000,-</b>	<b>Rp. 2.425.831.000,-</b>	<b>Rp. 13.244.550.059,-</b>	<b>94,73%</b>

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Dari Tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pagu Anggaran Perubahan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.981.933.000,- dengan realisasi Rp. 13.244.550.059,- Dengan serapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 94,73%. Dengan demikian pada tahun anggaran 2023 terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 737.382.941,-

**Tabel 3.18**  
**Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Masing-masing Bagian**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Bagian	Pagu Anggaran Murni	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)	Capaian kinerja
1	Tata Pemerintahan	Rp. 1.089.000.000,-	Rp. 1.272.002.000,-	Rp. 1.236.216.642,-	2,81%	100%
2	Kesejahteraan Rakyat	Rp. 7.336.259.000,-	Rp. 9.071.259.000,-	Rp. 8.621.674.532,-	4,96%	100%
3	Hukum	Rp. 647.157.000,-	Rp. 647.157.000,-	Rp. 509.036.950,-	21,34%	75,69%
4	Perekonomian	Rp. 285.000.000,-	Rp. 345.087.000,-	Rp. 314.491.815,-	8,87%	100%
5	Administrasi Pembangunan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-	Rp. 137.149.800,-	8,57%	100%
6	PBJ	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-	Rp. 86.104.096,-	4,33%	113,33%
7	Organisasi	Rp. 719.686.000,-	Rp. 838.808.000,-	Rp. 809.017.014,-	3,55%	100%
8	Prokompim	Rp. 1.259.000.000,-	Rp. 1.567.620.000,-	Rp. 1.530.859.210,-	2,41%	100%

*Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati*

## BAB IV PENUTUP

### KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 merupakan wujud semangat akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin profesional, efektif dan efisien. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya.

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran secara umum disebabkan oleh :

1. Mekanisme perencanaan yang jelas.
2. Memperhatikan hasil evaluasi program dan kegiatan atas program yang telah dilaksanakan.
3. Melaksanakan pemantauan atas realisasi kegiatan baik dari sisi kinerja dan keuangan dalam setiap triwulan.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan target yang direncanakan.

Adapun yang menjadi tantangan saat ini:

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan dimana pada Tahun 2023 ini Setda mengawal tercapainya Indikator Kinerja Daerah, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan- persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan- tantangan ini terutama Nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan koordinasi dan penggalan berbagai masalah di masyarakat agar

kebijakan tepat sasaran. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya untuk menerapkan siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintah dan perbaikan layanan publik semakin baik

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 ini disusun dan kiranya dapat menggambarkan capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pati.

Pati, Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEPATI



**Drs. JUMANI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701114 199011 1 001

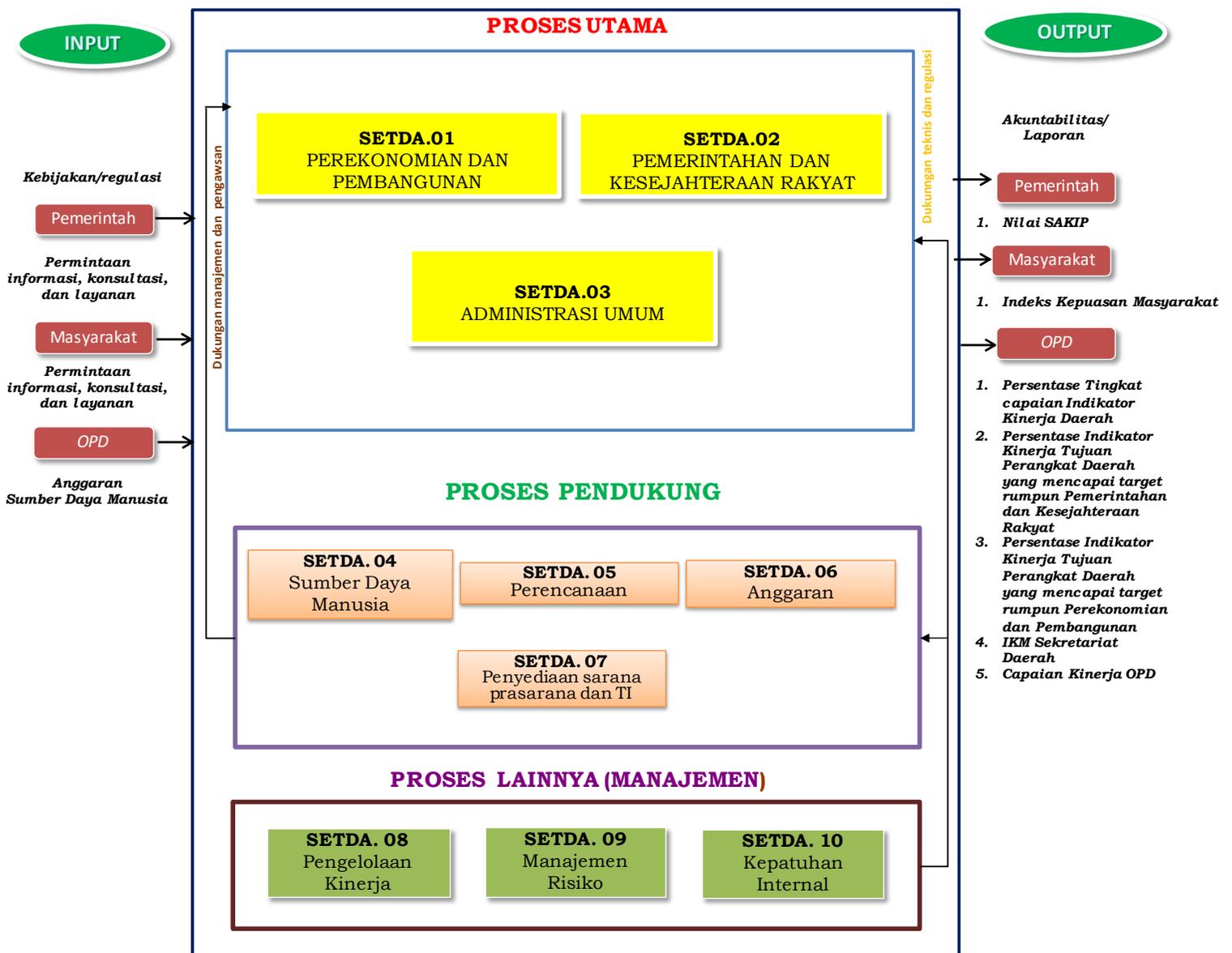
LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Pati  
Nomor : 130.01/037 Tahun 2023  
Tanggal : 14 Februari 2023

**PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI**

**1. Tabel Identifikasi Proses**

No.	Proses	Jenis Proses	Kode Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
		Utama/ Manajemen/ Lainnya	
1	Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan)	Utama	PBP.01
2	Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat	Utama	PBP.02
3	Penguatan infrastruktur wilayah	Utama	PBP.03
4	Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat	Utama	PBP.04
5	Peningkatan kondusivitas wilayah	Utama	PBP.05
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Utama	PBP.06
7	Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Utama	PBP.07
8	Peningkatan Kesempatan dan peluang kerja	Utama	PBP.08
9	Penurunan kesenjangan antar penduduk miskin	Utama	PBP.09
10	Peningkatan Akses Pelayanan Dasar	Utama	PBP.10
11	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Utama	PBP.11
12	Peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Utama	PBP.12
13	Peningkatan standar hidup masyarakat	Utama	PBP.13
14	Peningkatan kesetaraan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan	Utama	PBP.14
15	Peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan publik	Utama	PBP.15
16	Pewujudan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Manajemen	PBP.16
17	Peningkatan Kemandirian fiskal daerah	Utama	PBP.17

# LEVEL 1: HASIL IDENTIFIKASI PETA PROSES BISNIS



## LEVEL 2 – PETA SUB PROSES

### 2. Tabel Identifikasi Sub Proses - Lintas Fungsi - SOP Makro

No.	Proses/ Sub Proses	Kode Proses/ Sub Proses	Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan)</i>	<b>PBP.01</b>		
	<i>Peningkatan infrastruktur wilayah</i>	<b>PBP.03</b>		
	<i>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</i>	<b>PBP.06</b>		
	<i>Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja</i>	<b>PBP.07</b>		
	<i>Peningkatan Kesempatan dan peluang kerja</i>	<b>PBP.08</b>		
	<i>Peningkatan Akses Pelayanan Dasar</i>	<b>PBP.10</b>		
	<i>Peningkatan Kemandirian fiskal daerah</i>	<b>PBP.17</b>		
<b>I</b>	<b>Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>SETDA.01</b>		
1			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<b>SETDA.01.01</b>
2			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<b>SETDA.01.02</b>
3			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<b>SETDA.01.03</b>
4			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<b>SETDA.01.04</b>
	<i>Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat</i>	<b>PBP.04</b>		
	<i>Peningkatan kondusivitas wilayah</i>	<b>PBP.05</b>		

No.	Proses/ Sub Proses	Kode Proses/ Sub Proses	Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Penurunan kesenjangan antar penduduk miskin</i>	<b>PBP.09</b>		
	<i>Peningkatan derajat kesehatan masyarakat</i>	<b>PBP.11</b>		
	<i>Peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan</i>	<b>PBP.12</b>		
	<i>Peningkatan kesetaraan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan</i>	<b>PBP.14</b>		
<b>II</b>	<b>Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>SETDA.02</b>		
1			Administrasi Tata Pemerintahan	<b>SETDA.02.01</b>
2			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<b>SETDA.02.02</b>
3			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<b>SETDA.02.03</b>
4			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<b>SETDA.02.04</b>
	<i>Pewujudan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten</i>	<b>PBP.16</b>		
<b>III</b>	<b>Administrasi Umum</b>	<b>SETDA.03</b>		
1			Penataan Organisasi	<b>SETDA.03.01</b>
2			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<b>SETDA.03.02</b>

**Perekonomian dan  
Pembangunan (SETDA.01)**

Pelaksanaan Kebijakan  
Perekonomian

Pelaksanaan Administrasi  
Pembangunan

Pengelolaan Pengadaan Barang dan  
Jasa

Pemantauan Kebijakan Sumber  
Daya Alam

**Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
(SETDA.02)**

Administrasi Tata Pemerintahan

Pelaksanaan Kebijakan  
Kesejahteraan Rakyat

Fasilitasi dan Koordinasi  
Hukum

Fasilitasi Kerja Sama Daerah

**Administrasi Umum  
(SETDA.03)**

Penataan Organisasi

Pelaksanaan Protokol dan  
Komunikasi Pimpinan

### LEVEL 3 - PETA RELASI

#### Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (SETDA.01.01)

1. Kemenkop & UKM, Kemenpar, Ekraf dan Kemendagri
2. Bag. Perekonomian
3. Bag. Hukum
4. Asisten/Sekda
5. Bupati
6. OJK, BI dan Dirjen Perbendaharaan
7. Akademisi
8. Perbankan
9. BUMD/BLUD
10. PD/Unit Kerja
11. Penyedia Jasa

#### Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (SETDA.01.02)

1. Bag. Adm. Pembangunan
2. PD/Unit Kerja
3. Tim Penyusun Kebijakan
4. Bag. Hukum
5. Bag. Umum
6. Sekda/Asisten
7. Bupati
8. Tim Pengendalian
9. Tim Monev
10. Tim Pemetaan Pembangunan
11. Diskominfo
12. Pihak Ketiga

#### Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (SETDA.01.03)

1. PD/Unit Kerja
2. Bag. PBJ
3. Mitra
4. Bag. Hukum
5. Asisten/Sekda
6. Bupati
7. Diskominfo
8. LKPP

#### Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (SETDA.01.04)

1. Bag. Perekonomian
2. DLHK Prov. Jateng
3. ESDM Prov. Jateng
4. BPN
5. Dispertan
6. DKP
7. Disdagperin
8. DPMPTSP
9. Disnaker
10. DLH
11. Diskominfo
12. Dishub
13. BPS Kab.Pati
14. DPUTR
15. Disperkim
16. Dinas Ketapang
17. Dinas Koperasi & UMKM
18. Satpol PP

Administrasi Tata Pemerintahan  
(SETDA.02.01)

1. Kemendagri/KemenPANRB
2. Biro Tapem
3. Bag. Tapem
4. Bag. Hukum
5. Bupati
6. PD/Unit Kerja
7. Inspektorat
8. Pemprov Jateng
9. BPKP Jateng

Pelaksanaan Kebijakan  
Kesejahteraan Rakyat  
(SETDA.02.02)

1. Kemenkokesra
2. Kementrian Agama
3. Pemda Jateng
4. Bag. Kesra
5. Bag. Hukum
6. Asisten/Sekda
7. Bupati
8. PD/Unit Kerja
9. Lembaga Keagamaan & Sosial
10. TNI/Polri

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum  
(SETDA.02.03)

1. PD/Unit Kerja
2. Bag. Hukum
3. Akademisi/Konsultan
4. Kanwil Kemenkumham
5. DPRD
6. Masyarakat/Stakeholder
7. Biro Hukum
8. Asisten/Sekda
9. Bupati
10. BPHN
11. Tim/Kuasa Hukum Penanganan Perkara
12. Kepolisian RI (Polresta)
13. Kejaksaan Negeri

Fasilitasi Kerja Sama Daerah  
(SETDA.02.04)

1. Kemendagri
2. Mitra
3. Bag. Perekonomian
4. Bag. Hukum
5. Asisten/Sekda
6. Bupati
7. Kepala PD/Unit Kerja
8. PD/Unit Kerja Leading Sektor
9. Diskominfo

Penataan Organisasi  
(SETDA.03.01)

1. Kemendagri
2. KemenpanRB
3. Pemprov Jateng
4. BKPP
5. Inspektorat
6. BPKP
7. Perguruan Tinggi
8. Bag. Hukum
9. Asisten/Sekda
10. Bupati
11. DPRD
12. Bappeda
13. Bag. Organisasi

Pelaksanaan Protokol dan  
Komunikasi Pimpinan  
(SETDA.03.02)

1. Pimpinan : Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten & Staf Ahli
2. Diskominfo
3. PD/Unit Kerja
4. Bag. Prokompim

### 3. Tabel Identifikasi Lintas Fungsi

Proses (kode proses) : Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan) (PBP.01)  
Peningkatan infrastruktur wilayah (PBP.03)  
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PBP.06)  
Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja (PBP.07)  
Peningkatan Kesempatan dan peluang kerja (PBP.08)  
Peningkatan Akses Pelayanan Dasar (PBP.10)  
Peningkatan Kemandirian fiscal daerah (PBP.17)

Sub proses (kode sub proses) : Perekonomian dan Pembangunan (SETDA.01)

Lintas Fungsi (kode lintas fungsi) : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (SETDA.01.01)

No.	Kegiatan	Unit Kerja											Output	Penanggungjawab	
		Kemenkop & UKM, Kemenpar, Ekraf dan Kemendagri	Bag. Perekonomian	Bag. Hukum	Asisten/Se kda	Bupati	OJK, BI dan Dirjen Perbendaharaan	Akademisi	Perbankan	Bag. Perekonomian	BUMD/BLUD	PD/Unit Kerja			Penyedia Jasa
1	Pedoman Pembuatan regulasi Kebijakan Perekonomian	V												Hasil Regulasi kebijakan	Bag. Perekonomian
2	Menyusun konsep regulasi Kebijakan Perekonomian		V											Hasil konsep regulasi	Bag. Perekonomian
3	Melaksanakan legal drafting regulasi			V										Legalisasi regulasi	Bag. Perekonomian
4	Memberikan arahan kebijakan				V									Hasil arahan	Bag. Perekonomian
5	Menetapkan regulasi					V								Penetapan regulasi	Bag. Perekonomian
6	Memberikan arahan						V							Hasil arahan	Bag. Perekonomian
7	Memberikan masukan Kebijakan Perekonomian							V						Hasil Masukan kebijakan	Bag. Perekonomian
8	Memberikan data dan informasi								V					Data dan informasi diterima	Bag. Perekonomian

No.	Kegiatan	Unit Kerja												Output	Penanggungjawab	
		Kemenkop & UKM, Kemenpar, Ekraf dan Kemendagri	Bag. Perekonomian	Bag. Hukum	Asisten/Se kda	Bupati	OJK, BI dan Dirjen Perbendaharaan	Akademisi	Perbankan	Bag. Perekonomian	BUMD/BLUD	PD/Unit Kerja	Penyedia Jasa			
9	-melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan BUMD dan BLUD -melaksanakan Koordinasi, pembinaan, pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif -Menyusun rencana dan laporan kegiatan										V				Hasil koordinasi, pembinaan. Rencana dan laporan kegiatan	Bag. Perekonomian
10	-sebagai mitra -memberikan laporan dan menyampaikan informasi terkait capaian kinerja, -menyampaikan data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan bahan kebijakan.											V			Menjadi mitra dan data tersampaikan	Bag. Perekonomian
11	-melakukan koordinasi, pengumpulan data memberikan masukan kegiatan di lapangan -melakukan sosialisasi dan publikasi -menyusun laporan, dan melakukan monitoring kegiatan -Koordinasi, pembinaan, pengelolaan BUMD dan BLUD												V		Hasil koordinasi, pembinaan. Rencana dan laporan kegiatan	Bag. Perekonomian
12	Membuat studi terkait Ekonomi Kreatif												V		Studi terkait ekonomi kreatif selesai	Bag. Perekonomian



## IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI

Proses (kode proses) : Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan) (PBP.01)  
 Peningkatan infrastruktur wilayah (PBP.03)  
 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PBP.06)  
 Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja (PBP.07)  
 Peningkatan Kesempatan dan peluang kerja (PBP.08)  
 Peningkatan Akses Pelayanan Dasar (PBP.10)  
 Peningkatan Kemandirian fiscal daerah (PBP.17)

Sub proses (kode sub proses) : Perekonomian dan Pembangunan (SETDA.01)

Lintas Fungsi (kode lintas fungsi) : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (SETDA.01.02)

No.	Kegiatan	Unit Kerja											Output	Penanggungjawab		
		Bag. Adm. Pembangunan	PD/Unit Kerja	Tim Penyusun Kebijakan	Bag. Hukum	Bag. Umum	Sekda/Asisten	Bupati	Tim Pengendalian	Tim Monev	Tim Pemetaan Pembangunan	Bag. Adm. Pembangunan			Diskominfo	Pihak Ketiga
1	-menyusun surat keputusan pembentukan tim, SOP dan KAK dan konsep kebijakan -melakukan sosialisasi	v													Hasil Sosialisasi, pembentukan tim, SOP,KAK dan konsep	Bag. Adm. Pembangunan
2	-memberikan data permasalahan terkait kebijakan -memberikan informasi atau klarifikasi -memberikan masukan dan usulan		v												Penerimaan data permasalahan, informasi dan usulan	Bag. Adm. Pembangunan
3	menginventarisasi permasalahan, dan menyusun pemecahan permasalahan, rumusan kebijakan dan menyusun draft akhir kebijakan			v											Tersusunnya kebijakan	Bag. Adm. Pembangunan
4	memproses legal drafting				v										Legalisasi draft	Bag. Adm. Pembangunan
5	memproses persuratan					v									Persuratan terselesaikan	Bag. Adm. Pembangunan
6	memberikan arahan kebijakan						v								Hasil arahan	Bag. Adm. Pembangunan
7	memberikan arahan dan menetapkan kebijakan							v							Hasil arahan dan kebijakan	Bag. Adm. Pembangunan

No.	Kegiatan	Unit Kerja													Output	Penanggungjawab	
		Bag. Adm. Pembangunan	PD/Unit Kerja	Tim Penyusun Kebijakan	Bag. Hukum	Bag. Umum	Sekda/Asisten	Bupati	Tim Pengendalian	Tim Monev	Tim Pemetaan Pembangunan	Bag. Adm. Pembangunan	Diskominfo	Pihak Ketiga			
8	-mengidentifikasi awal permasalahan, pendalaman permasalahan dan pelaporan -melaksanakan pengendalian kebijakan strategis, melakukan pendokumentasian dan								V							Hasil identifikasi dan terlaksananya pengendalian kebijakan	Bag. Adm. Pembangunan
9	-memonitoring dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan -Menyusun laporan									V						Termonitoring dan hasil penyusunan laporan	Bag. Adm. Pembangunan
10	-menginventarisir data pelaksanaan pembangunan, - memasukan data peta digital, -melakukan updating data pembangunan, dan pelaporan										V					Data terupdate	Bag. Adm. Pembangunan
11	-mengidentifikasi permasalahan teknis dan non teknis operasional SIM -mengumpulkan dan menginventarisir data pengembangan SIM											V				Teridentifikasi permasalahan teknis dan terkumpulnya data	Bag. Adm. Pembangunan
12	mengampu pemeliharaan SIM, serta memberikan saran dan rekomendasi terkait pengembangan SIM												V			Pemeliharaan SIM dan catatan hasil rekomendasi	Bag. Adm. Pembangunan
13	mengembangkan SIM													V		SIM dikembangkan	Bag. Adm. Pembangunan



## IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI

Proses (kode proses) : Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan) (PBP.01)

Peningkatan infrastruktur wilayah (PBP.03)

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PBP.06)

Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja (PBP.07)

Peningkatan Kesempatan dan peluang kerja (PBP.08)

Peningkatan Akses Pelayanan Dasar (PBP.10)

Peningkatan Kemandirian fiscal daerah (PBP.17)

Sub proses (kode sub proses) : Perekonomian dan Pembangunan (SETDA.01)

Lintas Fungsi (kode lintas fungsi) : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (SETDA.01.03)

No.	Kegiatan	Unit Kerja							Output	Penanggungjawab	
		PD/Unit Kerja	Bag. PBJ	Mitra	Bag. Hukum	Asisten/Sekda	Bupati	Diskominfo			LKPP
1	menyampaikan data rencana pengadaan	V								Hasil data rencana pengadaan	Bag. PBJ
2	-Merumuskan kebijakan barang/jasa -Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa -pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi pengadaan barang/jasa pemerintah; -pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; -pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengadaan barang dan jasa		V							Hasil rumusan, pelaksanaan, pembinaan dan pemantauan kegiatan	Bag. PBJ
3	menjadi penyedia barang dan jasa			V						Mitra bergabung	Bag. PBJ
4	memproses legal drafting				V					Legalisasi draft	Bag. PBJ
5	memberikan arahan					V				Hasil arahan	Bag. PBJ
6	menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa						V			Hasil kebijakan PBJ	Bag. PBJ
7	membuat dan mengelola aplikasi Pengadaan Barang dan jasa							V		Aplikasi siap dipakai	Bag. PBJ
8	Koordinasi dan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa								V	Hasil koordinasi dan konsultasi	Bag. PBJ

**Proses PBP.01, PBP.03, PBP.06, PBP.07, PBP.08, PBP.10, PBP.17 CFM SETDA.01.03**

No.	Unit Kerja	Phase							
1	PD/Unit Kerja	menyampaik an data rencana pengadaan							
2	Bag. PBJ		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Merumuskan kebijakan barang/jasa</li> <li>-Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa</li> <li>-pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi pengadaan barang/jasa pemerintah;</li> <li>-pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;</li> <li>-pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan</li> </ul>						
3	Mitra			menjadi penyedia barang dan jasa					
4	Bag. Hukum				memproses legal drafting				
5	Asisten/Sekda					Memberikan arahan			
6	Bupati						menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa		
7	Diskominfo							membuat dan mengelola aplikasi Pengadaan Barang dan jasa	
8	LKPP								Koordinasi dan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa

### IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI

Proses (kode proses) : Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan) (PBP.01)  
 Peningkatan infrastruktur wilayah (PBP.03)  
 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PBP.06)  
 Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja (PBP.07)  
 Peningkatan Kesempatan dan peluang kerja (PBP.08)  
 Peningkatan Akses Pelayanan Dasar (PBP.10)  
 Peningkatan Kemandirian fiscal daerah (PBP.17)

Sub proses (kode sub proses) : Perekonomian dan Pembangunan (SETDA.01)

Lintas Fungsi (kode lintas fungsi) : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (SETDA.01.04)

No.	Kegiatan	Unit Kerja			Output	Penanggungjawab
		Bag. Perekonomian	DLHK Prov. Jateng, ESDM Prov. Jateng, ATR/BPN, BPS Kab. Pati, Dispertan, Dinas Ketapang, DKP, Disdagperin, DPMPTSP, Disnaker, DLH, Diskominfo, Dishub, DPUTR Disperkim, Dinas Koperasi & UMKM, Satpol PP	Bag. Perekonomian		
1	Menyusun surat keputusan pembentukan tim kegiatan SDA, menyusun laporan dan melaksanakan koordinasi kegiatan SDA	V			Pembentukan tim, laporan dan hasil koordinasi	Bag. Perekonomian
2	-melakukan koordinasi, pengumpulan data memberikan masukan kegiatan di lapangan -melakukan sosialisasi dan publikasi -menyusun laporan, dan melakukan monitoring kegiatan -Koordinasi, pembinaan		V		Hasil koordinasi, pembinaan. Rencana dan laporan kegiatan	Bag. Perekonomian
3	Membuat pelaporan dari hasil koordinasi			V	Hasil pelaporan kegiatan	Bag. Perekonomian

**Proses PBP.01, PBP.03, PBP.06, PBP.07, PBP.08, PBP.10, PBP.17 CFM SETDA.01.04**

No.	Unit Kerja	Phase	
1	Bag. Perekonomian	Menyusun surat keputusan pembentukan tim kegiatan SDA, menyusun laporan dan melaksanakan koordinasi kegiatan SDA	Membuat pelaporan dari hasil koordinasi
2	DLHK Prov. Jateng, ESDM Prov. Jateng, ATR/BPN, BPS Kab. Pati, Dispertan, Dinas Ketapang, DKP, Disdagperin, DPMPTSP, Disnaker, DLH, Diskominfo, Dishub, DPUTR Disperkim, Dinas Koperasi & UMKM, Satpol PP		<ul style="list-style-type: none"> <li>-melakukan koordinasi, pengumpulan data memberikan masukan kegiatan di lapangan</li> <li>-melakukan sosialisasi dan publikasi</li> <li>-menyusun laporan, dan melakukan monitoring kegiatan</li> <li>-Koordinasi, pembinaan, pengelolaan SDA</li> </ul>

## IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI

Proses (kode proses) : Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat (PBP.04)  
 Peningkatan kondusivitas wilayah (PBP.05)  
 Penurunan kesenjangan antar penduduk miskin (PBP.09)  
 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (PBP.11)  
 Peningkatan kualitas dan pemerataan akses Pendidikan (PBP.12)  
 Peningkatan kesetaraan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan (PBP.14)

Sub proses (kode sub proses) : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (SETDA.02)

Lintas Fungsi (kode lintas fungsi) : Administrasi Tata Pemerintahan (SETDA.02.01)

No	Kegiatan	Unit Kerja									Output	Penanggungjawab
		Kemendagri / KemenPANRB	Biro Tapem	Bag. Tapem	Bag. Hukum	Bupati	PD/Unit Kerja	Inspektorat	Pemprov Jateng	BPKP Jateng		
1	Pedoman pembuatan regulasi dan melakukan evaluasi adm tata pemerintahan	V									Hasil Regulasi dan Evaluasi	Bag. Tapem
2	Melakukan Koordinasi kegiatan adm tata pemerintahan		V								Hasil koordinasi kegiatan	Bag. Tapem
3	Menyusun surat keputusan pembentukan tim kegiatan adm tata pemerintahan, laporan dan melaksanakan koordinasi kegiatan tata pemerintahan			V							Pembentukan tim, laporan dan hasil koordinasi	Bag. Tapem
4	Melakukan Legal drafting surat keputusan pembentukan tim kegiatan adm tata pemerintahan				V						Legalisasi surat pembentukan tim	Bag. Tapem
5	Mengesahkan surat keputusan pembentukan tim kegiatan adm tata pemerintahan					V					Pengesahan keputusan pembentukan tim	Bag. Tapem

No	Kegiatan	Unit Kerja									Output	Penanggungjawab
		Kemendagri / KemenPANRB	Biro Tapem	Bag. Tapem	Bag. Hukum	Bupati	PD/Unit Kerja	Inspektorat	Pemprov Jateng	BPKP Jateng		
6	Mengumpulkan data kegiatan adm tata pemerintahan						V				Data kegiatan tersusun dan lengkap	Bag. Tapem
7	Melakukan review/evaluasi kegiatan adm tata pemerintahan							V			Hasil review dan evaluasi	Bag. Tapem
8	Melakukan evaluasi dan penilaian perkembangan kegiatan adm tata pemerintahan								V		Hasil evaluasi dan perkembangan kegiatan	Bag. Tapem
9	Evaluasi dan verifikasi kegiatan adm tata pemerintahan									V	Hasil evaluasi dan verifikasi kegiatan	Bag. Tapem

**Proses PBP.04, PBP.05, PBP.09, PBP.11, PBP.12, PBP.14 CFM SETDA.02.01**

No.	Unit Kerja	Phase							
1	Kemendagri / KemenPANRB	Pedoman pembuatan regulasi dan melakukan evaluasi adm tata pemerintahan							
2	Biro Tapem		Melakukan Koordinasi kegiatan adm tata pemerintahan						
3	Bag. Tapem			Menyusun surat keputusan pembentukan tim kegiatan adm tata pemerintahan, laporan dan melaksanakan koordinasi kegiatan tata pemerintahan					
4	Bag. Hukum				Melakukan Legal drafting surat keputusan pembentukan tim kegiatan adm tata pemerintahan				
5	Bupati					Mengesahkan surat keputusan pembentukan tim kegiatan adm tata pemerintahan			
6	PD/Unit Kerja						Mengumpulkan data kegiatan adm tata pemerintahan		
7	Inspektorat							Melakukan review/evaluasi kegiatan adm tata pemerintahan	
8	Pemprov Jateng								Melakukan evaluasi dan penilaian perkembangan kegiatan adm tata pemerintahan
9	BPKP Jateng								Evaluasi dan verifikasi kegiatan adm tata pemerintahan

## IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI

Proses (kode proses) : Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat (PBP.04)  
 Peningkatan kondusivitas wilayah (PBP.05)  
 Penurunan kesenjangan antar penduduk miskin (PBP.09)  
 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (PBP.11)  
 Peningkatan kualitas dan pemerataan akses Pendidikan (PBP.12)  
 Peningkatan kesetaran kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan (PBP.14)

Sub proses (kode sub proses) : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (SETDA.02)

Lintas Fungsi (kode lintas fungsi) : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (SETDA.02.02)

No.	Kegiatan	Unit Kerja										Output	Penanggungjawab
		Kemenkokesra	Kementerian Agama	Pemda Jateng	Bag. Kesra	Bag. Hukum	Asisten/Sekda	Bupati	PD/Unit Kerja	Lembaga Keagamaan & Sosial	TNI/Polri		
1	Pedoman pembuatan regulasi dan melakukan evaluasi kebijakan kesra	V										Hasil Regulasi dan Evaluasi	Bag. Kesra
2	Sebagai mitra dalam pendampingan pelaksanaan kebijakan keagamaan		V									Disetujui menjadi mitra pendamping	Bag. Kesra
3	Melakukan koordinasi dan pembinaan kegiatan kesra			V								Hasil koordinasi dan pembinaan	Bag. Kesra
4	Menyusun surat keputusan pembentukan tim kegiatan kesra, menyusun laporan dan melaksanakan koordinasi kegiatan kesra				V							Pembentukan tim, laporan dan hasil koordinasi	Bag. Kesra
5	Melakukan Legal drafting surat keputusan pembentukan tim kegiatan Kesra					V						Legalisasi surat pembentukan tim	Bag. Kesra
6	Memberikan arahan kebijakan						V					Hasil arahan	Bag. Kesra
7	Mengesahkan kebijakan kesra pemerintahan							V				Kebijakan disahkan	Bag. Kesra
8	Melakukan koordinasi dan mengumpulkan data terkait kesra								V			Hasil koordinasi dan terkumpulnya data	Bag. Kesra

No.	Kegiatan	Unit Kerja										Output	Penanggungjawab	
		Kemenkokesra	Kementrian Agama	Pemda Jateng	Bag. Kesra	Bag. Hukum	Asisten/Sekda	Bupati	PD/Unit Kerja	Lembaga Keagamaan & Sosial	TNI/Polri			
9	Sebagai mitra dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan										V		Disetujui menjadi mitra	Bag. Kesra
10	Sebagai mitra dalam kegiatan kesra											V	Disetujui menjadi mitra	Bag. Kesra

**Proses PBP.04, PBP.05, PBP.09, PBP.11, PBP.12, PBP.14 CFM SETDA.02.02**

No.	Unit Kerja	Phase								
1	Kemenkokesra	Pedoman pembuatan regulasi dan melakukan evaluasi kebijakan kesra								
2	Kementrian Agama		Sebagai mitra dalam pendampingan pelaksanaan kebijakan keagamaan							
3	Pemda Jateng			Melakukan koordinasi dan pembinaan kegiatan kesra						
4	Bag. Kesra				Menyusun surat keputusan pembentukan tim kegiatan kesra, menyusun laporan dan melaksanakan koordinasi kegiatan					
5	Bag. Hukum					Melakukan Legal drafting surat keputusan pembentukan tim kegiatan Kesra				
6	Asisten/Sekda						Memberikan arahan kebijakan			
7	Bupati							Mengesahkan kebijakan kesra pemerintahan		
8	PD/Unit Kerja								Melakukan koordinasi dan mengumpulkan data terkait kesra	
9	Lembaga Keagamaan & Sosial									Sebagai mitra dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan
10	TNI/Polri									Sebagai mitra dalam kegiatan kesra

## IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI

Proses (kode proses) : Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat (PBP.04)  
 Peningkatan kondusivitas wilayah (PBP.05)  
 Penurunan kesenjangan antar penduduk miskin (PBP.09)  
 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (PBP.11)  
 Peningkatan kualitas dan pemerataan akses Pendidikan (PBP.12)  
 Peningkatan kesetaraan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan (PBP.14)

Sub proses (kode sub proses) : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (SETDA.02)

Lintas Fungsi (kode lintas fungsi) : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (SETDA.02.03)

No.	Kegiatan	Unit Kerja													Output	Penanggungjawab
		PD/Unit Kerja	Bag. Hukum	Akademesi/Konsultan	Kanwil Kemenkumham	DPRD	Masyarakat/Stakeholder	Biro Hukum	Asisten/Sekda	Bupati	BPHN	Tim/Kuasa Hukum Penanganan Perkara	Kepolisian RI (Polresta)	Kejaksaan Negeri		
1	Mengusulkan dan mengajukan draft produk hukum dan melakukan pembahasan produk hukum	V													Pembahasan Draft dan Usulan diterima	Bag. Hukum
2	-Melakukan koordinasi, pendampingan penyusunan produk hukum secara substansi materi maupun legal draft dan harmonisasi produk hukum -Melakukan pengundangan, pendokumentasian dan penyebarluasan informasi produk hukum -Melakukan evaluasi produk hukum		V												Hasil koordinasi, pendokumentasian dan evaluasi kegiatan	Bag. Hukum
3	Menyusun naskah akademik Raperda dan / atau kajian produk hukum			V											Hasil naskah Raperda	Bag. Hukum
4	Pendampingan penyusunan dan harmonisasi produk hukum				V										Hasil penyusunan dan harmonisasi	Bag. Hukum
5	Melakukan pembahasan Raperda					V									Hasil Pembahasan Raperda	Bag. Hukum
6	-Memberikan umpan balik dalam Proses Publik hearing/ Uji publik -Menerima sosialisasi						V								Hasil uji publik dan sosialisasi	Bag. Hukum
7	Melakukan pembinaan (konsultasi, klarifikasi, evaluasi)							V							Hasil konsultasi, klarifikasi dan evaluasi	Bag. Hukum
8	Memberikan arahan kebijakan								V						Hasil arahan	Bag. Hukum

No.	Kegiatan	Unit Kerja													Output	Penanggungjawab
		PD/Unit Kerja	Bag. Hukum	Akademesi/Konsultan	Kanwil Kemenkumham	DPRD	Masyarakat/Stakeholder	Biro Hukum	Asisten/Sekda	Bupati	BPHN	Tim/Kuasa Hukum Penanganan Perkara	Kepolisian RI (Polresta)	Kejaksaan Negeri		
9	Melakukan pengesahan produk hukum									V					Pengesahan produk hukum	Bag. Hukum
10	Memberikan arahan dan										V				Hasilarahan	Bag. Hukum
11	Memproses penanganan perkara											V			Penanganan perkara terlaksana	Bag. Hukum
12	Memproses penanganan khusus perkara pidana												V		Penganganan khusus perkara pidana terlaksana	Bag. Hukum
13	Sebagai Tim jaksa pengacara negara													V	Disetujui sebagai Tim jaksa	Bag. Hukum

**Proses PBP.04, PBP.05, PBP.09, PBP.11, PBP.12, PBP.14 CFM SETDA.02.03**

No.	Unit Kerja	Phase																		
1	PD/Unit Kerja	Mengusulkan dan mengajukan draft produk hukum dan melakukan pembahasan																		
2	Bag. Hukum		-Melakukan koordinasi, pendampingan penyusunan produk hukum secara substansi materi maupun legal draft dan harmonisasi produk hukum -Melakukan pengundangan, pendokumentasian dan penyebarluasan informasi produk hukum -Melakukan evaluasi produk hukum																	
3	Akademesi/Konsultan			Menyusun naskah akademik Raperda dan/atau kajian produk hukum																
4	Kanwil Kemenkumham				Pendampingan penyusunan dan harmonisasi produk hukum															
5	DPRD					Melakukan pembahasan Raperda														
6	Masyarakat/ Stakeholder						-Memberikan umpan balik dalam Proses Publik hearing/ Uji publik -Menerima sosialisasi dan penyuluhan													
7	Biro Hukum						Melakukan pembinaan (konsultasi, klarifikasi, evaluasi)													
8	Asisten/Sekda							Memberikan arahan kebijakan												
9	Bupati								Melakukan pengesahan produk hukum											
10	BPHN									Memberikan arahan dan pendampingan JDIH										
11	Tim/Kuasa Hukum Penanganan Perkara										Memproses penanganan perkara									
12	Kepolisian RI (Polresta)											Memproses penanganan khusus perkara pidana								
13	Kejaksaan Negeri																			Sebagai Tim jaksa pengacara

## IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI

Proses (kode proses) : Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat (PBP.04)  
 Peningkatan kondusivitas wilayah (PBP.05)  
 Penurunan kesenjangan antar penduduk miskin (PBP.09)  
 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (PBP.11)  
 Peningkatan kualitas dan pemerataan akses Pendidikan (PBP.12)  
 Peningkatan kesetaraan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan (PBP.14)

Sub proses (kode sub proses) : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (SETDA.02)

Lintas Fungsi (kode lintas fungsi) : Fasilitasi Kerja Sama Daerah (SETDA.02.04)

No.	Kegiatan	Unit Kerja									Output	Penanggungjawab
		Kemendagri	Mitra	Bag. Perekonomian	Bag. Hukum	Asisten/Sekda	Bupati	Kepala PD/Unit Kerja	PD/Unit Kerja Leading Sektor	Diskominfo		
1	Pedoman pembuatan regulasi kebijakan kerjasama	V									Hasil Regulasi dan Evaluasi	Bag. Tapem
2	Mengajukan permohonan kerjasama melalui aplikasi		V								Aplikasi menyetujui pengajuan	Bag. Tapem
3	-Memverifikasi kelengkapan -Melaksanakan koordinasi dgn PD/Unit kerja leading sector -pembuatan MOU -melakukan koordinasi penyempurnaan MOU -Melakukan monev dan			V							Hasil verifikasi, koordinasi, MOU dan monev	Bag. Tapem
4	Memproses legal drafting perjanjian (MOU)				V						Legalisasi MOU	Bag. Tapem
5	Memberikan arahan					V					Hasil arahan	Bag. Tapem
6	Mengesahkan MOU tingkat kota						V				Pengesahan MOU	Bag. Tapem
7	Mengesahkan MOU Teknis tingkat PD/Unit kerja							V			Pengesahan MOU Teknis tingkat PD/Unit kerja	Bag. Tapem
8	-Menyusun perjanjian kerja sama -Melaksanakan kerjasama									V	Hasil penyusunan perjanjian dan terlaksananya kerjasama	Bag. Tapem
9	Membuat dan mengelola aplikasi kerja sama									V	Aplikasi dapat dikelola	Bag. Tapem

**Proses PBP.04, PBP.05, PBP.09, PBP.11, PBP.12, PBP.14 CFM SETDA.02.04**

No.	Unit Kerja	Phase							
1	Kemendagri	Pedoman pembuatan regulasi kebijakan kerjasama							
2	Mitra		Mengajukan permohonan kerjasama melalui aplikasi						
3	Bag. Perekonomian			-Memverifikasi kelengkapan -Melaksanakan koordinasi dgn PD/Unit kerja leading sector -pembuatan MOU -melakukan koordinasi penyempurnaan MOU -Melakukan monev dan menyusun laporan					
4	Bag. Hukum				Memproses legal drafting perjanjian (MOU)				
5	Asisten/Sekda					Memberikan arahan			
6	Bupati						Mengesahkan MOU tingkat kota		
7	Kepala PD/Unit Kerja							Mengesahkan MOU Teknis tingkat PD/Unit kerja	
8	PD/Unit Kerja Leading Sektor							-Menyusun perjanjian kerja sama -Melaksanakan kerjasama	
9	Diskominfo								Membuat dan mengelola aplikasi kerja sama

## IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI

Proses (kode proses) : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten (PBP.16)

Sub proses (kode sub proses) : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (SETDA.03)

Lintas Fungsi (kode lintas fungsi) : Penataan Organisasi (SETDA.03.01)

No.	Kegiatan	Unit Kerja												Output	Penanggungjawab	
		Kemendagri	KemenpanRB	PemprovJateng	BKPP	Inspektorat	BPKP	PerguruanTinggi	Bag. Hukum	Asisten/Sekda	Bupati	DPRD	Bappeda			Bag. Organisasi
1	penyusunan regulasi	V													Hasil Regulasi	Bag. Organisasi
2	penyusunan regulasi		V												Hasil Regulasi	Bag. Organisasi
3	melakukan monitoring dan evaluasi			V											Hasil monitoring dan evaluasi	Bag. Organisasi
4	melaksanakan Koordinasi dan pengumpulan data				V										Hasil koordinasi dan data terkumpul	Bag. Organisasi
5	melakukan review					V									Hasil review	Bag. Organisasi
6	melakukan evaluasi						V								Hasil evaluasi	Bag. Organisasi
7	sebagai mitra pembuatan kajian							V							Menjadi mitra	Bag. Organisasi
8	melakukan legal drafting							V							Legalisasi draft	Bag. Organisasi
9	memberi arahan								V						Hasil arahan	Bag. Organisasi
10	memberi arahan dan mengesahkan kebijakan									V					Hasil arahan dan kebijakan	Bag. Organisasi
11	Pembahasan Raperda										V				Hasil raperda	Bag. Organisasi
12	melaksanakan koordinasi											V			Koordinasi tersampaikan	Bag. Organisasi
13	-menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan kelembagaan dan analisa jabatan. -menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik. -menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan reformasi birokrasi di Daerah.												V		Hasil rumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan evaluasi kegiatan	Bag. Organisasi

**Proses PBP.16 CFM SETDA.03.01**

No.	Unit Kerja												Phase		
1	Kemendagri	penyusunan regulasi													
2	KemenpanRB		penyusunan regulasi												
3	Pemprov Jateng			melakukan monitoring dan evaluasi											
4	BKPP				melaksanakan Koordinasi dan pengumpulan data										
5	Inspektorat					melakukan review									
6	BPKP						melakukan evaluasi								
7	Perguruan Tinggi							sebagai mitra pembuatan kajian							
8	Bag. Hukum								melakukan legal drafting						
9	Asisten/Sekda									memberi arahan					
10	Bupati										memberi arahan dan mengesahkan kebijakan				
11	DPRD											Pembahasan Raperda			
12	Bappeda												melaksanakan		
13	Bag. Organisasi														<ul style="list-style-type: none"> <li>-menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan kelembagaan dan analisa jabatan.</li> <li>-menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.</li> <li>-menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan reformasi birokrasi di Daerah.</li> </ul>

### IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI

Proses (kode proses) : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten (PBP.16)

Sub proses (kode sub proses) : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (SETDA.03)

Lintas Fungsi (kode lintas fungsi) : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (SETDA.03.02)

No.	Kegiatan	Unit Kerja				Output	Penanggungjawab
		Pimpinan : Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten & Staf Ahli	Diskominfo	PD/Unit Kerja	Bag. Prokompim		
1	Memberikan arahan	V				Hasil arahan	Bag. Prokompim
2	Melakukan peliputan acara		V			Peliputan acara terealisasi	Bag. Prokompim
3	melaksanakan koordinasi			V		Koordinasi terlaksana	Bag. Prokompim
4	-memfasilitasi Keprotokolan (Laporan koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah, Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah, dan Penyelenggaraan kegiatan seremonial) -memfasilitasi Komunikasi Pimpinan (rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli)				V	Hasil koordinasi dan fasilitasi kegiatan	Bag. Prokompim

**Proses PBP.16 CFM SETDA.03.02**

No.	Unit Kerja	Phase		
1	Pimpinan : Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten & Staf Ahli	Memberikan arahan		
2	Diskominfo		Melakukan peliputan acara	
3	PD/Unit Kerja			melaksanakan koordinasi
4	Bag. Prokompim			-memfasilitasi Keprotokolan (Laporan koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah, Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah, dan Penyelenggaraan kegiatan seremonial) -memfasilitasi Komunikasi Pimpinan (rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli)

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PATI



Drs. JUMANI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701114 199011 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. JUMANI, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.

Jabatan : Pj. Bupati Pati

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 16 Januari 2023



HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.



Drs. JUMANI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19701114 199011 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%
2.	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%
3.	Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM Sekretariat Daerah	3,52

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.978.686.000,00	APBD KAB
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 9.052.416.000,00	APBD KAB
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 525.000.000,00	APBD KAB

Pati, 16 Januari 2023



HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.



Dis. JUMANI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701114 199011 1 001



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan		
									I		II		III		IV			13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=7+13				16=15/6*100	
									K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)			K	Rp (Ribu)
1		4.1.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	56	950.000	14	267.642	3	30.380	4	44.205	5	91.493	2	88.194	14	254.272	100,00	95,00	14	254.272	25,00	26,77	Perenc & Keu	
		4.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	48	518.000	12	122.843	3	10.200	3	39.745	3	29.944	3	41.001	12	120.889	100,00	98,41	12	120.889	25,00	23,34	Perenc & Keu	
		4.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	4	46.000	1	7.000	0	0	0	2.389	0	0	1	4.332	1	6.720	100,00	96,00	1	6.720	25,00	14,61	Perenc & Keu	
		4.1.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Laporan	8	158.000	2	18.305	1	0	0	6.064	0	7.450	1	3.977	2	17.490	100,00	95,55	2	17.490	25,00	11,07	Perenc & Keu	
																			<b>100,00</b>	<b>95,38</b>			<b>39,63</b>	<b>19,79</b>			
																			<b>Predikat Kinerja</b>		<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
		4.1.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	4	286.000	1	9.000	1	0	0	2.296	0	0	1	5.791	1	8.087	100	89,86	1	8.087	25,00	2,83		
		4.1.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	Laporan	16	286.000	4	9.000	1	0	1	2.296	1	0	1	5.791	4	8.087	100,00	89,86	4	8.087	25,00	2,83	Perenc & Keu	
																			<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>		<b>100,00</b>	<b>89,86</b>			<b>25,00</b>	<b>2,83</b>	
																			<b>Predikat Kinerja</b>		<b>ST</b>	<b>T</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
		4.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	16	3.109.805	4	306.600	2	750	0	117.035	2	14.060	0	147.628	4	279.473	100,00	91,15	4	279.473	25,00	8,99		
		4.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	4	386.860	1	6.600	0	0	0	0	1	6.600	0	0	1	6.600	100,00	100,00	1	6.600	25,00	1,71	Umum	
		4.1.1.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	48	23.000	12	5.000	3	750	3	0	3	0	3	2.308	12	3.058	100,00	61,16	12	3.058	25,00	13,30	Umum	
		4.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	264	1.499.945	20	40.000	0	0	0	0	1	370	14	21.670	15	22.040	75,00	55,10	15	22.040	5,68	1,47	Umum	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2023 yang dievaluasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023(%)	Unit Penanggung Jawab	Keterangan					
									I		II		III		IV												
									K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)							K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K
1	2	3	4	5	5.A	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100	17	18									
		4.1.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	400	1.200.000	100	255.000	30	0	70	117.035	0	7.090	0	123.650	100	247.775	100,00	97,17	100	247.775	25,00	20,65	Prokmpim	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>93,75</b>	<b>78,36</b>			<b>20,17</b>	<b>9,28</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>														<b>T</b>	<b>T</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
		4.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	Dokumen	40	15.044.888	9	3.322.732	9	195.673	0	721.190	0	708.294	0	1.438.849	9	3.064.005	100,00	92,21	9	3.064.005	22,50	20,37		
		4.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	8	312.000	1	58.860	1	9.880	0	14.916	0	10.686	0	22.347	1	57.829	100,00	98,25	1	57.829	12,50	18,53	Umum	
		4.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	8	975.000	3	249.930	1	35.867	0	159.722	0	35.798	2	0	3	231.387	100,00	92,58	3	231.387	37,50	23,73	Umum	
		4.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	8	218.000	1	11.750	1	0	0	5.328	0	0	0	5.480	1	10.808	100,00	91,98	1	10.808	12,50	4,96	Umum	
		4.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	28	4.668.888	7	1.215.369	6	78.997	0	231.876	0	322.013	1	553.996	7	1.186.882	100,00	97,66	7	1.186.882	25,00	25,42	Umum	
		4.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	660.000	3	109.697	0	0	1	16.030	0	7.225	2	81.124	3	104.379	100,00	95,15	3	104.379	25,00	15,81	Umum	
		4.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	16	1.800.000	12	135.929	3	10.112	3	36.071	3	30.636	3	53.310	12	130.129	100,00	95,73	12	130.129	75,00	7,23	Umum	
		4.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	48	2.570.000	12	725.013	3	0	3	85.223	3	106.123	3	400.616	12	591.961	100,00	81,65	12	591.961	25,00	23,03	Umum	
		4.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	48	3.750.000	12	808.184	3	60.816	3	172.025	3	195.813	3	319.977	12	748.631	100,00	92,63	12	748.631	25,00	19,96	Perenc & Keu	
		4.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	40	91.000	10	8.000	1	0	1	0	0	0	0	2.000	2	2.000	20,00	25,00	2	2.000	5,00	2,20	Umum	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>91,11</b>	<b>85,63</b>			<b>26,94</b>	<b>15,65</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>														<b>ST</b>	<b>T</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
		4.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	6.573.421	3	839.061	1	421.500	1	47.258	1	249.800	0	84.337	3	802.895	100,00	95,69	3	802.895	25,00	12,21		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan		
									I		II		III		IV			13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=7+13				16=15/6*100	
									K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)			K	Rp (Ribu)
1	2	3	4	5	5.A	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100	17	18									
	4.1.1.2.07.5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	36	5.015.368	1	444.496	1	421.500	0	0	0	0	1	421.500	100,00	94,83	1	421.500	2,78	8,40	Umum				
	4.1.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	39	345.392	6	50.335	0	0	6	47.258	0	0	6	47.258	100,00	93,89	6	47.258	15,38	13,68	Umum				
	4.1.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	22	1.212.661	9	344.230	0	0	0	0	2	249.800	7	84.337	9	334.137	100,00	97,07	9	334.137	40,91	27,55	Umum		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>100,00</b>	<b>95,26</b>			<b>19,69</b>	<b>16,55</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>														<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
	4.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dokumen	16	10.720.000	4	2.482.780	4	467.624	0	556.477	0	559.306	0	742.246	4	2.325.654	100,00	93,67	4	2.325.654	25,00	21,69			
	4.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	48	110.000	12	25.800	3	0	3	8.000	3	0	3	9.275	12	17.275	100,00	66,96	12	17.275	25,00	15,70	Umum		
	4.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	48	3.970.000	12	943.750	3	127.548	3	198.208	3	213.011	3	331.927	12	870.694	100,00	92,26	12	870.694	25,00	21,93	Umum		
	4.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	48	340.000	12	101.140	3	8.930	3	10.266	3	6.444	3	51.689	12	77.328	100,00	76,46	12	77.328	25,00	22,74	Umum		
	4.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	48	6.300.000	12	1.412.090	3	331.147	3	340.003	3	339.852	3	349.355	12	1.360.358	100,00	96,34	12	1.360.358	25,00	21,59	Perenc & Keu		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>100,00</b>	<b>83,00</b>			<b>25,00</b>	<b>20,49</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>														<b>ST</b>	<b>T</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
	4.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Dokumen	24	7.220.000	6	1.709.067	5	88.470	0	188.640	0	369.343	1	984.156	6	1.630.609	100,00	95,41	6	1.630.609	25,00	22,58			
	4.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	550.000	4	102.370	3	7.972	0	32.098	1	13.937	0	44.849	4	98.856	100,00	96,57	4	98.856	100,00	17,97	Umum		
	4.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	124	3.500.000	124	826.290	55	33.538	0	139.055	53	310.798	16	308.342	124	791.734	100,00	95,82	124	791.734	100,00	22,62	Umum		
	4.1.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	178	150.000	128	26.000	0	0	25	3.580	60	8.400	43	12.730	128	24.710	100,00	95,04	128	24.710	71,91	16,47	Umum		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan		
									I		II		III		IV			13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=7+13				16=15/6*100	
									K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)			K	Rp (Ribu)
1	2	3	4	5	5.A	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100											
	4.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	5	2.400.000	3	500.947	0	0	0	0	0	0	494.830	3	494.830	100,00	98,78	3	494.830	60,00	20,62	Umum			
	4.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	230	400.000	230	97.210	42	11.814	50	12.116	38	21.720	100	37.393	230	83.043	100,00	85,43	230	83.043	100,00	20,76	Umum		
	4.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	21	220.000	32	156.250	5	35.146	2	1.790	2	14.488	23	86.013	32	137.436	100,00	87,96	32	137.436	152,38	62,47	Umum		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>100,00</b>	<b>93,26</b>			<b>97,38</b>	<b>26,82</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>														<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>								
	4.1.1.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Dokumen	16	8.384.400	4	1.332.300	1	106.527	1	300.240	1	218.635	1	345.250	4	970.651	100,00	72,86	4	970.651	25,00	11,58			
	4.1.1.2.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang/ Bulan	2	3.120.000	1	330.000	1	82.500	0	82.500	0	82.500	0	82.500	1	330.000	100,00	100,00	1	330.000	50,00	10,58	Perenc & Keu		
	4.1.1.2.11.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	5	250.400	1	30.300	0	0	1	29.760	0	0	0	0	29.760	100,00	98,22	1	29.760	20,00	11,88	Umum			
	4.1.1.2.11.3	Pelaksanaan Medical Check-Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti medical check-up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	14.000	1	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Umum			
	4.1.1.2.11.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang/ Bulan	2	5.000.000	1	970.000	1	24.027	0	187.980	0	136.135	0	262.750	1	610.891	100,00	62,98	1	610.891	50,00	12,22	Umum		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>100,00</b>	<b>87,07</b>			<b>40,00</b>	<b>11,56</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>														<b>ST</b>	<b>T</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
	4.1.1.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	Dokumen	12	6.203.055	3	1.252.787	2	109.669	0	283.706	0	265.816	1	456.685	3	1.115.876	100,00	89,07	3	1.115.876	25,00	17,99			
	4.1.1.2.12.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Paket	4	1.880.000	1	442.867	1	34.941	0	108.830	0	120.032	0	174.053	1	437.857	100,00	98,87	1	437.857	25,00	23,29	Umum		
	4.1.1.2.12.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	4	1.050.000	1	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Umum			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan	
									I		II		III		IV												
									K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)											K
1	2	3	4	5	5.A	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100	17	18									
	4.1.1.2.12.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Paket	24	3.273.055	6	809.370	5	74.728	0	174.876	0	145.784	1	282.632	6	678.020	100,00	83,77	6	678.020	25,00	20,72	Umum		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																<b>66,67</b>	<b>60,88</b>			<b>16,67</b>	<b>14,67</b>						
<b>Predikat Kinerja</b>																<b>S</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>						
	4.1.1.2.13	Penataan Organisasi				3.805.000				838.808		196.294		138.042		93.623		381.059		809.017		96,45		809.017		21,26	
			Persentase peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah	%	100			100	0		100		100		100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan analisis bidang organisasi	%	100			100	40		58,33		100		100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	4.1.1.2.13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Dokumen	48	1.600.000	12	299.049	3	11.496	3	87.120	3	56.155	3	134.837	12	289.607	100,00	96,84	12	289.607	25,00	18,10	Organisasi		
	4.1.1.2.13.2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitas pelayanan publik dan tata laksana	Laporan	20	800.000	5	99.800	1	3.807	1	14.428	1	18.311	2	59.214	5	95.760	100,00	95,95	5	95.760	25,00	11,97	Organisasi		
	4.1.1.2.13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Dokumen	16	1.120.000	4	420.897	0	175.839	3	33.388	0	16.967	1	178.653	4	404.847	100,00	96,19	4	404.847	25,00	36,15	Organisasi		
	4.1.1.2.13.4	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Dokumen	4	55.000	1	4.940	0	2.706	0	0	0	0	1	2.190	1	4.896	100,00	99,11	1	4.896	25,00	8,90	Organisasi		
	4.1.1.2.13.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Dokumen	4	230.000	1	14.122	1	2.446	0	3.106	0	2.190	0	6.165	1	13.907	100,00	98,48	1	13.907	25,00	6,05	Organisasi		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																<b>100,00</b>	<b>97,31</b>			<b>25,00</b>	<b>16,23</b>						
<b>Predikat Kinerja</b>																<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>						
	4.1.1.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah saluran informasi publik terkait pimpinan yang dilaksanakan	Media	5	11.400.000	5	1.567.620	4	31.472	0	364.623	1	427.727	0	707.038	5	1.530.859	100,00	97,65	5	1.530.859	100,00	13,43			
	4.1.1.2.14.1	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitas keprotokolan	Laporan	48	550.000	12	124.000	3	0	3	45.015	3	15.075	3	62.407	12	122.497	100,00	98,79	12	122.497	25,00	22,27	Prokompim		
	4.1.1.2.14.2	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitas komunikasi pimpinan	Laporan	48	550.000	12	71.600	3	1.537	3	23.710	3	12.589	3	30.828	12	68.665	100,00	95,90	12	68.665	25,00	12,48	Prokompim		
	4.1.1.2.14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	Laporan	48	10.300.000	12	1.372.020	3	29.935	3	295.898	3	400.062	3	613.803	12	1.339.698	100,00	97,64	12	1.339.698	25,00	13,01	Prokompim		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																<b>100,00</b>	<b>97,44</b>			<b>25,00</b>	<b>15,92</b>						
<b>Predikat Kinerja</b>																<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan		
									I		II		III		IV			13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=7+13				16=15/6*100	
									K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)			K	Rp (Ribu)
1					5.A	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100											
2	Meningkatnya efektivitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.1.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			44.549.000		10.990.418	206.394	5.319.925	1.160.628	3.679.981	10.366.928	94,33	10.366.928	23,27											
		4.1.2.2.01	Administrasi Tata Pmerintahan			6.840.000		1.164.002	9.892	429.424	132.128	557.736	1.129.179	97,01	1.129.179	16,51											
				Persentase peraturan bidang tata pemerintahan pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	%	100		100	0	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00											
				Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang tata pemerintahan	%	100		100	0	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4.1.2.2.01.1	Penataan Administrasi Pemerintah	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	Dokumen	124	3.275.000	31	988.362	10	7.884	4	414.674	13	123.431	4	420.871	31	966.859	100,00	97,82	31	966.859	25,00	29,52	Tapem	
		4.1.2.2.01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	Dokumen	116	3.235.000	1	75.640	0	2.008	1	1.814	0	3.100	0	65.181	1	72.102	100,00	95,32	1	72.102	0,86	2,23	Tapem	
		4.1.2.2.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen	32	330.000	8	100.000	3	0	1	12.936	4	5.598	0	71.684	8	90.218	100,00	90,22	8	90.218	25,00	27,34	Tapem	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>100,00</b>	<b>94,46</b>			<b>16,95</b>	<b>19,70</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>														<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
		4.1.2.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			32.715.000		9.071.259	108.830	4.683.998	848.456	2.980.391	8.476.395	93,44	8.476.395	25,91											
				Persentase peraturan bidang kesra pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	%	100		100	0	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00											
				Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang kesra	%	100		100	0	60	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4.1.2.2.02.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Dokumen	136	27.450.000	34	8.422.103	5	101.850	18	4.205.549	5	815.246	6	2.885.088	34	8.007.733	100,00	95,08	34	8.007.733	25,00	29,17	Kesra	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan		
									I		II		III		IV			13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=7+13				16=15/6*100	
									K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan) DPA	K	Rp (Ribuan)		K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)			K	Rp (Ribuan)
1	2	3	4	5	5.A	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100	17	18									
		4.1.2.2.02.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	Dokumen	48	3.500.000	12	484.156	3	740	3	451.382	4	7.283	2	4.257	12	463.662	100,00	95,77	12	463.662	25,00	13,25	Kesra	
		4.1.2.2.02.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kerajinan, trantibum linmas	Dokumen	32	1.100.000	8	150.000	2	6.240	3	27.068	1	15.928	2	86.045	8	135.280	100,00	90,19	8	135.280	25,00	12,30	Kesra	
		4.1.2.2.02.4	Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Keluarga	3.360	355.000	90	10.000	0	0	0	0	90	10.000	0	0	90	10.000	100,00	100,00	90	10.000	2,68	2,82	Kesra	
		4.1.2.2.02.5	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Keluarga	2.520	310.000	50	5.000	0	0	0	0	50	5.000	50	5.000	50	5.000	100,00	100,00	50	5.000	1,98	1,61	Kesra	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>100,00</b>	<b>96,21</b>			<b>15,93</b>	<b>11,83</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>														<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
		4.1.2.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			4.444.000		647.157		42.710		202.032		142.275		122.020		509.037		78,66		509.037		11,45			
				Persentase verifikasi rancangan/ konsep produk hukum daerah	%	100		100	19,44	31,56	40,13	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53		
				Persentase kasus yang terselesaikan	%	100		100	33,33	33,33	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		4.1.2.2.03.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	3.778	1.030.000	957	152.286	186	29.190	116	38.858	82	30.485	224	49.300	608	147.833	63,53	97,08	608	147.833	16,09	14,35	Hukum	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan		
									I		II		III		IV			13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=7+13				16=15/6*100	
									K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan) DPA	K	Rp (Ribuan)		K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)			K	Rp (Ribuan)
1	2	3	4	5	5.A	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100	17	18									
	4.1.2.2.03.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Kasus	12	2.064.000	3	318.790	1	0	0	90.341	2	47.220	0	59.295	3	196.856	100,00	61,75	3	196.856	25,00	9,54	Hukum		
	4.1.2.2.03.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Dokumen	3.778	1.350.000	957	176.081	186	13.520	116	72.832	82	64.570	224	13.425	608	164.347	63,53	93,34	608	164.347	16,09	12,17	Hukum		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																			<b>75,69</b>	<b>84,05</b>			<b>19,06</b>	<b>12,02</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>																			<b>T</b>	<b>T</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
	4.1.2.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	%	100	550.000	100	108.000	0	44.962	100	4.472	100	37.769	100	19.835	100,00	107.038	100,00	99,11	100,00	107.038	100,00	19,46			
	4.1.2.2.04.1	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	Dokumen	80	480.000	20	96.000	4	42.497	6	1.970	5	34.166	5	16.505	20	95.137	100,00	99,10	20	95.137	25,00	19,82	Tapem		
	4.1.2.2.04.2	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri	Dokumen	4	30.000	1	4.000	0	602	0	0	1	0	0	3.330	1	3.932	100,00	98,30	1	3.932	25,00	13,11	Tapem		
	4.1.2.2.04.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	Laporan	8	40.000	2	8.000	0	1.864	1	2.502	1	3.604	0	0	2	7.969	100,00	99,61	2	7.969	25,00	19,92	Tapem		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																			<b>100,00</b>	<b>99,00</b>			<b>25,00</b>	<b>17,62</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>																			<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
3	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	4.1.3	Program Perekonomian dan Pembangunan			3.940.000		585.087		24.460		89.582		150.841		272.862		537.746		91,91		537.746		13,65			
	4.1.3.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				1.505.000		180.000		6.855		31.754		62.385		70.428		171.421		95,23		171.421		11,39			
			Persentase peraturan bidang perekonomian pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	%	100		100		0		100		100		100		100,00		100,00		100,00		100,00				
			Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang perekonomian	%	100		100		0		100		100		100		100,00		100,00		100,00		100,00				
	4.1.3.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	176	190.000	44	32.314	8	740	12	8.514	12	8.094	12	14.789	44	32.137	100,00	99,45	44	32.137	25,00	16,91	Perekonomian		
	4.1.3.2.01.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan pengendalian dan distribusi perekonomian	Laporan	508	725.000	92	68.455	20	3.525	28	14.298	25	21.436	19	28.193	92	67.452	100,00	98,53	92	67.452	18,11	9,30	Perekonomian		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Rencana PD pada Tahun 2026 (Aksi periode rencana PD)		Realisasi capaian kinerja Rencana PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Rencana PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan																								
						6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13		16=15/6*100																					
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)			K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	17	18																		
1					5.A																																												
		4.1.3.20.4.3	koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, ketahanan, dan perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, ketahanan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUMH, penanaman modal, tenaga kerja	Dokumen	32	138,000			8	160,087	2	9,696	3	7,937	1	19,832	2	101,345	8	138,810	100.00	86.71		138,810	0.00	100.59	Personalia																					
		4.1.3.20.4.2	koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, komunikasi, pertukangan, statistik, persandian	Dokumen	2	25,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		0	0.00	0.00	Personalia																				
		4.1.3.20.4.3	koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perumahan, kesehatan permukiman, pertanian	Dokumen	72	92,000			18	5,000	1	0	3	1,110	5	2,020	9	1,130	18	4,260	100.00	85.20		18	4,260	25.00	4.53	Personalia																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100.00	85.95			12.50	82.81																									
Predikat Kinerja																			BT	T			SR	SR																									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						42,198,689		8,297,204		13,386,852							7,784,328		12,618,286		39,055,480																												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D 3)																			97.03	90.20			37.44	16.44																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D 3)																			BT	T			SR	SR																									
Faktor Pendorong Keterlaksanaan Kinerja:																																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																																	
Tindak lanjut yang dipersiapkan dalam triwulan berikutnya:																																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana PD kabupaten/kota berikutnya:																																																	

Disusun oleh :  
Pati, Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI  
DR. JUMANI, M.Si  
Pemimpin Utama Madya  
NIP. 19701114 199011 1 001

Dievaluasi:  
Pati, Januari 2024  
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PATI

DR. MUHTAR, S.I.P., M.M.  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19660620 199603 1 003